



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

MEDIA HKI

VOLUME 1 / 2024

PEMANTIK INOVASI & KREASI

PROTEKSI INDIKASI GEOGRAFIS,
EKONOMI RAKYAT BERBUAH MANIS



LIPUTAN KHUSUS

Menjaga Asa pada Tahun Indikasi Geografis

KINFOGRAFIK

Capaian DJKI Selama Tahun Merek 2023

Proteksi Indikasi Geografis, Ekonomi Rakyat Berbuat Manis

Kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan pihak terkait menjadi kunci utama memaksimalkan potensi indikasi geografis suatu wilayah. Sejumlah implikasi positif dari upaya ini, di antaranya melindungi kekayaan budaya maupun alam di suatu daerah, sekaligus memberikan dampak signifikan pada peningkatan ekonomi dan kesejahteraan komunitas lokal secara berkelanjutan: produk lokal yang semakin dikenal luas hingga terbukanya lapangan kerja.

Pada edisi ini, Media HKI menampilkan sejumlah hasil sinergi antara DJKI sebagai bagian dari pemerintah—terhadap perlindungan kekayaan intelektual sepanjang 2023. Dengan dicanangkannya 2024 sebagai Tahun Indikasi Geografis—DJKI pun berkomitmen untuk bersama-sama, meningkatkan proteksi terhadap indikasi geografis.



Cover Media HKI Volume I Tahun 2024 dibuat oleh Mohammad Taufiq (Emte). Sebagai seniman, ilustrator, dan desainer grafis, Emte telah berkarier selama lebih dari 20 tahun. Melalui karya yang ekstensif, Emte memotret upaya masyarakat Indonesia dalam melindungi indikasi geografis wilayahnya. Anda dapat menemukan karya lainnya melalui akun Instagram @emteemte.

*Redaksi menerima kontribusi tulisan dan artikel yang sesuai dengan misi penerbitan.
Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi.*



Diterbitkan oleh : Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual | **Penasehat :** Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual | **Pengarah :** Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Direktur Hak Cipta dan Desain Industri, Direktur Paten, DTLST dan Rahasia Dagang, Direktur Merek dan Indikasi Geografis, Direktur Teknologi Informasi KI, Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa, Direktur Kerja Sama dan Edukasi | **Penanggung Jawab :** Eka Fridayanti | **Pemimpin Redaksi :** Dita Komala Putri | **Tim Redaksi :** Sylvia Sonang Fiesta Ria, Citra Rosa Budiman, Galih Wisudha Pratama, Panji Putra Manik, Destika Ajeng Wulandari, Kustin Ayuwuragil Desmuflihah | **Redaktur Foto :** Muhammad Adityo Ilhamy, Fikri Azhari | **Desain Grafis dan Layout :** Tim Hukumonline | **Alamat Redaksi :** Gedung Eks. Sentra Mulia Lantai 6 , Jl. HR Rasuna Said Kav. X-6 Jakarta Selatan

DAFTAR ISI



LIPUTAN KHUSUS

Sukses Tingkatkan Ekosistem Kekayaan Intelektual pada 2023 **5**



LIPUTAN KHUSUS

Respons Kendala 2023, Sekretariat DJKI Bangun Talent Unggul Pada Tahun yang Baru **9**



LIPUTAN KHUSUS

Tembus Semua Target 2023 **11**



LIPUTAN KHUSUS

DJKI Maksimalkan Sumber Daya Manusia Melalui Indonesia IP Academy **15**



LIPUTAN KHUSUS

Program Unggulan 2023 Rampung, Ini Rencana Direktorat TI pada 2024 **17**



LIPUTAN KHUSUS

Lika-liku Melindungi Kebebasan Berkreasi **20**



LIPUTAN KHUSUS

Direktorat Merek dan Indikasi Geografis Raih Sejumlah Capaian Positif pada 2023 **23**



BELAJAR KI-LAT

Cara Kita Lindungi Identitas dan Warisan Lewat Indikasi Geografis **27**



JELAJAH INDIKASI GEOGRAFIS

Mengenal 3 Produk Indikasi Geografis di Indonesia **29**



KI-INFOGRAFIS

34



SAPA DAERAH

40



AGENDA KI

44

TRIVIA
48

KUIS
50



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Perubahan Jam Operasional Layanan Informasi dan Konsultasi Kekayaan Intelektual

Nomor: HKI.1-OT.02.02-100



- **Senin - Kamis, Pukul 08.00 - 15.00 WIB**
- **Jumat, Pukul 08.00 - 15.30 WIB**

Contact Center :



Call Center
152



E-mail
halodjki@dgip.go.id



Live Chat
dgip.go.id



Video Conference
dgip.go.id

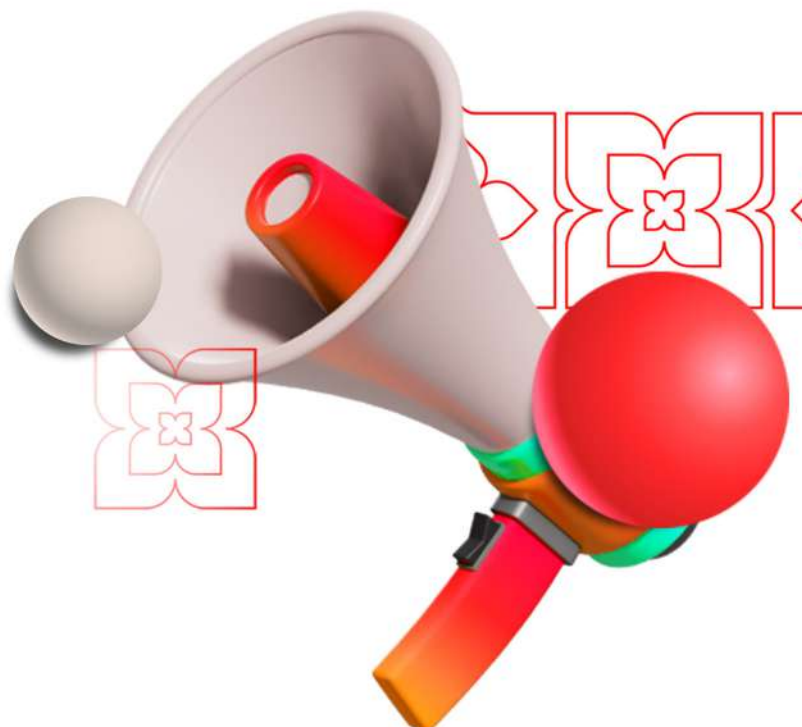
Media Sosial :



@DJKI.Kemenkumham



DJKI.Indonesia



Sukses Tingkatkan Ekosistem Kekayaan Intelektual pada 2023



DJKI telah berhasil melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan kesadaran KI di tengah masyarakat.



Rabu, 06/12/2023
Evaluasi kinerja DJKI tahun
2023 untuk optimalkan
kinerja organisasi

Foto :
DJKI

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) terus mengupayakan transformasi ekonomi yang diarahkan pemerintah Indonesia untuk kebijakan *green economy*, demi pembangunan berkelanjutan. Dalam hal ini, DJKI terus mendorong masyarakat untuk terus berkreasi dan berinovasi melalui kekayaan intelektual (KI).

Capaian kinerja DJKI pada 2023 terbilang membanggakan. Pasalnya, ketimbang dua tahun sebelumnya, ada peningkatan permohonan KI (2023) mencapai 17,12%. Bahkan, total peningkatan per 24 November 2023 mencapai hampir 18%.

“Peningkatan per 24 November 2023 yaitu hampir 18% berkat aplikasi POP Hak Cipta dan POP Merek, serta adanya program sosialisasi seperti Satu Jam Bersama Menkumham, DJKI Mendengar, DJKI Mengajar, Patent Examiner Goes to Campus, Mobile IP Clinic, dan IP Talks,” jelas Direktur DJKI, Min Usihen, Jumat (26/11).



Min Usihen, S.H., M.H.
Direktur Jenderal
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Selama 2023, DJKI juga terus menggunakan layanan digital yang telah berjalan sebelumnya, seperti Konsultasi Video Conference Kekayaan Intelektual (SIVIKI), *live chat* pada laman dgip.go.id, Call Center 152, Persetujuan Otomatis Pencatatan Hak Cipta (POP HC), Persetujuan Otomatis Perpanjangan Merek (POP Merek), dan semua layanan pendaftaran *online* untuk hampir seluruh jenis KI.

Kegiatan DJKI tersebut berbuah manis. Lebih dari 40 ribu orang telah menerima manfaat dan pendaftaran KI semakin bertambah. Selama 2023, DJKI juga terus menggunakan layanan digital yang telah berjalan sebelumnya, seperti layanan Konsultasi Video Conference Kekayaan Intelektual (SIVIKI), *chat* pada laman dgip.go.id, Call Center 152, Persetujuan Otomatis Pencatatan Hak Cipta (POP HC), Persetujuan Otomatis Perpanjangan Merek (POP Merek), dan semua layanan pendaftaran *online* untuk hampir seluruh jenis KI.

Mendulang Prestasi pada 2023

Min menjelaskan, selama 2023 DJKI telah meraih banyak prestasi. Beberapa di antaranya, yaitu mendapatkan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) tertinggi di Kemenkumham (86,55); meraih predikat *'TOP Digital Implementation 2023'*; dan *'TOP Leader on Digital Implementation 2023'* untuk DJKI.

“Selain itu, Homeland Security Investigations (HSI) juga memberikan DJKI penghargaan penegakan KI terbaik. Untuk sertifikasi ISO, DJKI telah meraih ISO 9001:2015 tentang manajemen mutu, ISO 20000-1:2018 untuk manajemen layanan merek berbasis IT, dan ISO 27001:2022 terkait keamanan informasi,” Min mengungkapkan.

Sepanjang 2023, DJKI telah menerima 491 laporan mengenai penutupan situs serta 430 laporan mengenai situs yang diduga melanggar HKI. Selain itu, DJKI juga menerima 53 aduan pelanggaran KI, aktif menangani 128 aduan, dan telah menyelesaikan 22 aduan. Tidak lupa, DJKI mensertifikasi 183 pusat perbelanjaan di total 31 provinsi seluruh Indonesia.

Sepanjang 2023, DJKI telah menerima 491 laporan mengenai penutupan situs serta 430 laporan mengenai situs yang diduga melanggar HKI. Selain itu, DJKI juga menerima 53 aduan pelanggaran KI, aktif menangani 128 aduan, dan telah menyelesaikan 22 aduan. Tidak lupa, DJKI mensertifikasi 183 pusat perbelanjaan di total 31 provinsi seluruh Indonesia.

Adapun, dalam upaya mencapai program dan kegiatan dalam rencana strategis tahun 2020-2024, DJKI menyadari, masih banyak pelanggaran KI di masyarakat. Untuk itu, pada 2023, DJKI melakukan berbagai upaya meningkatkan kesadaran KI di tengah masyarakat.

“Kami melakukan berbagai upaya peningkatan kesadaran pentingnya pendaftaran KI melalui pelaksanaan Mobile IP Clinic, yaitu sebanyak 49 kali di 33 provinsi di Indonesia, IP and Tourism 2023 di Kepulauan Riau, DJKI Aktif Belajar dan Mengajar, DJKI Mendengar dengan total 31 kali dengan jumlah peserta di kisaran 13.950, serta Kumham Goes To Campus di 17 perguruan tinggi dengan total 4.550 peserta,” tutur Min.

Menghadapi 2024, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia telah menetapkan 2024 sebagai Tahun Tematik Indikasi Geografis. Kemenkumham berharap, rancangan ini dapat menyebar ke lebih banyak masyarakat, sehingga indikasi geografis semakin dikenal.

“Kami juga berharap pemerintah memahami pentingnya melindungi potensi produk lokal yang dapat mengangkat ekonomi daerah serta terciptanya sinergi antara kanwil Kemenkumham dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan

lainnya,” ujar Min.

Dalam membangun ekosistem kekayaan intelektual yang berdampak pada dorongan transformasi ekonomi nasional, Kemenkumham berharap dapat terus menjadi garda terdepan perlindungan produk-produk unggulan daerah dari penyalahgunaan atau pemalsuan. Rencana ini, sekaligus mampu mempromosikan produk-produk unggulan daerah yang merupakan bagian dari identitas budaya dan alam.

Diberikan juga penghargaan terhadap kreativitas dari produk unggulan tersebut yang meliputi aksi masyarakat dalam mengolah serta mengembangkan keunikan maupun ciri khas wilayahnya. Secara tidak langsung, hal ini dapat meningkatkan kunjungan wisatawan ke daerah tersebut, sehingga DJKI perlu menghargai dan membantu mempromosikan produk unggulan daerah.

“Pada akhirnya, mari perkuat komitmen kita dengan berlandaskan semangat berkolaborasi, fokus pada pekerjaan, memperkuat kerja sama guna mendukung dan menyukseskan berbagai program dan tugas fungsi DJKI ke depannya,” pungkas Min.

Respons Kendala 2023, Sekretariat DJKI Bangun *Talent* Unggul pada Tahun yang Baru

***Talent-talent* terbaik merupakan bagian dari kunci keberhasilan DJKI dalam memberikan layanan publik terhadap masyarakat.**

Sekretariat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM (DJKI Kemenkumham) merupakan salah satu unit kerja yang bertugas dalam pemberian dukungan manajemen terhadap pelaksanaan tugas satuan organisasi.

Sekretariat DJKI melakukan urusan ketatausahaan, keprotokoleran, dan kerumahtanggaan, berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam rangka realisasi program di lingkup DJKI, serta melakukan pelaksanaan tugas hubungan kemasyarakatan.

Di bawah Sekertaris DJKI Sucipto, sepanjang 2023 Sekretariat DJKI tercatat mampu menyelesaikan sejumlah tugas dukungan demi merealisasikan program unggulan DJKI secara umum. Menurut Sucipto, peran sekretariat dapat dilihat dari sejumlah aspek seperti anggaran, sarana- prasarana, termasuk di dalamnya upaya pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia.

Khusus dari aspek SDM, Sucipto menjelaskan, pihaknya tengah menyiapkan sebuah inovasi dalam rangka menyediakan *talent-talent* terbaik bagi semua unit kerja DJKI.



“Inovasi di bidang sekretariat adalah kita harus membangun *talent-talent* yang bagus dengan cara menguatkan SDM-nya,” ungkap Sucipto.

Talent-talent terbaik, menurut Sucipto merupakan bagian dari kunci keberhasilan DJKI dalam memberikan layanan publik terhadap masyarakat. Dirinya mengakui, salah satu tugas pelayanan publik DJKI harus didukung oleh SDM yang bagus agar mampu memberikan pelayanan publik yang prima.

Dirinya memberi contoh sejumlah capaian yang telah diraih DJKI sepanjang tahun 2023. Secara umum terjadi peningkatan permohonan merek nasional dan kolektif secara signifikan dengan program unggulan One Village One Brand (OVOB) dan Geographical Indication (GI) Drafting Camp yang dipadukan dengan Mobile IP Clinic.

Menurut Sucipto, program-program ini berkolerasi positif terhadap peningkatan realisasi layanan pendaftaran indikasi geografis pada 2023. Adapun dari 2022 ke 2023 ada peningkatan lebih dari 50%. “Sementara untuk pengawasan indikasi geografis sendiri mengalami kecenderungan peningkatan dari tahun 2021 hingga 2023,” ujar Sucipto.

Dari tahun 2022 ke 2023, ada peningkatan lebih dari 50% pada permohonan merek nasional dan kolektif. Sementara untuk pengawasan indikasi geografis juga cenderung meningkat dari 2021-2023.

Demi memberikan dukungan terhadap realisasi program-program unggulan, Sekretariat DJKI telah berkoordinasi dengan berbagai pihak agar program kerja dapat tersusun dengan jelas dan terencana dengan baik.

Selain itu, beberapa telah dilakukan oleh Sekretariat, yaitu membangun kerja sama sinergis antara DJKI dengan kantor wilayah; asistensi dan fasilitas intensif yang dilakukan oleh DJKI dan kantor wilayah dengan para pemangku kepentingan merek dan indikasi geografis; dukungan anggaran yang memadai untuk mewujudkan pelaksanaan setiap program yang telah direncanakan; serta menyiapkan *expertise* dari tim ahli indikasi geografis yang telah memiliki pengalaman belasan tahun dalam melakukan asistensi dan pemeriksaan indikasi geografis.

Kendala

Di luar capaian-capaian tersebut, Sucipto memaparkan sejumlah kendala yang dihadapi oleh Sekretariat DJKI. Kendala-kendala tersebut di antaranya seperti kapasitas SDM dari segi kualitas dan kuantitas yang perlu ditingkatkan.

“Dari segi kualitas dibutuhkan pengembangan kompetensi yang berkelanjutan. Dari segi kuantitas dibutuhkan penambahan jumlah SDM sehingga dapat mendukung program-program yang dibuat,” Sucipto memaparkan.

Sucipto menyebutkan, di luar itu semua, pemahaman para pemangku kepentingan akan perlindungan indikasi geografis dan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mendukung sistem perlindungan indikasi geografis tergolong masih kurang. Hal ini menjadi salah satu sebab rendahnya indikasi geografis terdaftar di Indonesia, jika dibandingkan dengan potensi indikasi geografis yang ada.

Kendala lain yang juga ditemukan, terkait kemampuan pemohon atau dinas pembina dalam menyusun dokumen deskripsi; peningkatan pemahaman dari pemangku kepentingan terkait akan perlindungan indikasi geografis; dan fungsi pengawasan yang seharusnya dapat dilakukan oleh pemerintah daerah. Sejauh ini, fungsi tersebut masih dilaksanakan oleh pemerintah pusat (DJKI) sehingga cakupan dan frekuensi pengawasan yang dilakukan sangat terbatas setiap tahunnya.

Terobosan

Pada 2024, Sucipto menjelaskan pihaknya akan melakukan sejumlah terobosan seperti memberikan pelatihan/bimbingan teknis untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi para pegawai di lingkungan Direktorat Merek dan Indikasi Geografis.

Selain itu, Sekretariat DJKI juga melakukan sejumlah langkah, seperti memberikan informasi KI sejak dini kepada kampus, sekolah, dan tempat perniagaan yang dapat melahirkan produk lokal Indonesia; penyusunan

SOP terkait perubahan Orta (Permenkumham No. 28 Tahun 2023); penyempurnaan juklak dan juknis pemeriksaan substantif merek; penyusunan quality management system pada pemeriksaan merek; penyusunan panduan penyederhanaan dokumen deskripsi bagi para pemohon; serta penyusunan juklak dan juknis pengawasan indikasi geografis sehingga fungsi pengawasan dapat dilakukan oleh pemerintah daerah.

Langkah lainnya yang juga akan dilakukan dalam rangka mengatasi kendala-kendala di atas adalah diseminasi dan promosi indikasi geografis yang dilakukan secara intensif dan berkelanjutan; melanjutkan program-program yang berhasil mendukung pencapaian kinerja di tahun ini untuk tetap dilaksanakan tahun-tahun berikutnya.

“Serta rencana pembentukan tim pembinaan indikasi geografis nasional dan *roadmap* indikasi geografis nasional pada tahun 2024,” tutup Sucipto.



Dr. Sucipto S.H., M.H., M.Kn
Sekretaris
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

TEMBUS SEMUA TARGET 2023



Strategi besar dan sinergi antara direktorat maupun kementerian lembaga dibutuhkan untuk memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat.

Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST), dan Rahasia Dagang Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (DJKI Kemenkumham) mencatat capaian cemerlang pada 2023 dengan menembus sejumlah target yang ditetapkan. Ini berkat berbagai program yang gencar dilaksanakan sepanjang tahun lalu. Kinerja *kinclong* ini akan dilanjutkan pada tahun ini.

Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang Kementerian Hukum dan HAM Yasmon menjelaskan, ada tiga jenis tugas utama yang telah dilaksanakan: penyelesaian permohonan paten, penyelesaian rekomendasi kebijakan, dan penyelesaian putusan hasil sidang banding.

“Dapat kami sampaikan bahwa capaian kinerja kami di 2023, alhamdulillah tercapai semua bahkan melebihi target yang ditetapkan,” ujar Yasmon.

Dari aspek penyelesaian permohonan paten, pihaknya berhasil mencapai 109 persen dari target yang ditetapkan. Bahkan dari aspek penyelesaian rekomendasi kebijakan, pihaknya berhasil mencatat capaian enam kali lipat dari target yang ditetapkan. Pada 2023 mereka menghasilkan 834 rekomendasi kebijakan, jauh melebihi dari target yang ditetapkan yakni 140 rekomendasi.



Drs. Yasmon, M.L.S.
Direktur
Paten, DTLST dan Rahasia Dagang

Kamis, 07/03

DJKI dongkrak peningkatan paten dalam negeri melalui patent one stop service

Foto :

DJKI

Adapun dari aspek jumlah putusan hasil sidang banding, pihaknya menghasilkan 26 putusan sidang banding melebihi target yakni 25 putusan sidang banding. Artinya, realisasinya mencapai 104 persen dari target yang ditetapkan.

Selain itu, pihaknya juga mencatat kenaikan permohonan paten yang diajukan masyarakat. Pada 2023 pihaknya menerima 15.033 permohonan meningkat 6,9 persen dibandingkan 2022 yang sebanyak 14.058 permohonan.

Perlu dicatat juga, lanjut Yasmon, bahwa pada 2023 terjadi kenaikan persentase permintaan paten dari dalam negeri. Pada 2022 jumlah pemohon paten dari dalam negeri mencapai 39 persen dari total permintaan. Angka itu meningkat pada 2023 menjadi 40,25 persen dari total permohonan paten.

Ia menambahkan, untuk perihal jumlah pemberian paten, pihaknya tidak diberikan target tertentu. Hanya saja, pihaknya juga mencatat kenaikan pemberian paten. Pada 2023, pihaknya memberikan *granted patent* sebanyak 8.462. Ini melebihi capaian 2022 yang sebanyak 5.093.

"Ada kenaikan cukup signifikan hingga sekitar 3.300 penyelesaian permohonan *granted patent*," kata Yasmon.

Berbagai Program

Peningkatan jumlah permohonan paten salah satunya karena berbagai program dan kegiatan yang dilakukan. Pada 2023, pihaknya juga bekerja sama dengan Direktorat Kerja Sama dan Edukasi untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan.

Salah satu kegiatannya adalah Patent Examiners Goes To Campus. Melalui kegiatan ini, para pemeriksa senior paten datang ke beberapa perguruan tinggi yang memiliki potensi kekayaan intelektual yang besar. Pada kesempatan itu, mereka memberikan bimbingan dan pendampingan kepada para penemu dan peneliti di perguruan tinggi.

"Ada 10 perguruan tinggi yang kami berikan pendampingan dan asistansi. Jadi, kami yakini, meningkatnya permohonan paten dari perguruan tinggi adalah hasil dari kegiatan ini," kata Yasmon.

Yasmon menambahkan, keberhasilan pencapaian pada 2023 itu salah satunya ditopang dengan berbagai program yang dilaksanakan sepanjang tahun lalu. Pada 2023 pihaknya menyelenggarakan *workshop* penyelesaian substantif paten di 12 kota di 12 provinsi.

Melalui kegiatan ini, pihaknya dapat mempercepat penyelesaian substantif paten. Sebab, pihaknya



menghadirkan langsung tim pemeriksa paten untuk bertemu dengan pemohon paten. Ini agar para pemeriksa dapat langsung memeriksa substantif paten yang dimohonkan.

“Kami menargetkan bahwa di pengujung kegiatan ini, sudah ada putusan final patennya. Ini menjadi salah satu kegiatan yang menurut hemat kami, bisa membawa dampak terkait dengan meningkatnya jumlah penyelesaian permohonan paten di 2023,” Yasmon menambahkan.

Semua keberhasilan mencapai target itu, jelas Yasmon, dilakukan bukan tanpa kendala dan tantangan. Salah satu kendala dan tantangan terbesar adalah terbatasnya jumlah sumber daya manusia (SDM) yang ada.

Menurutnya, ada banyak sekali kegiatan baik dari direktorat maupun kerja sama dengan direktorat lainnya. Sedangkan pada saat yang sama, jumlah SDM yang tersedia terbatas.

Yasmon memberi contoh. Misalkan, pihaknya menurunkan tenaga untuk menyelesaikan permohonan paten ke beberapa perguruan tinggi di sejumlah provinsi. Pasalnya, saat ini pihaknya menerima begitu banyak permohonan paten dari perguruan tinggi dan lembaga penelitian dan pengembangan (litbang) yang belum dapat terpenuhi. Selain itu, ada banyak permintaan narasumber

ke daerah, tapi tidak bisa dipenuhi karena keterbatasan SDM yang ada. Padahal, dengan jumlah SDM yang jauh lebih banyak, kegiatan yang akan dilaksanakan dapat lebih banyak.

“Kami coba memaksimalkan dengan pemberian bimbingan dan asistensi dengan memanfaatkan teknologi. Kami banyak lakukan pertemuan via *zoom* dengan peneliti dengan pemohon yang dalam proses pemeriksaan substantif,” Yasmon melanjutkan.

Rencana 2024

Dengan berbekal capaian positif selama 2023, pihaknya siap dan optimistis menyambut 2024. Tahun ini pihaknya berencana menyelenggarakan kegiatan bertajuk ‘Layanan Paten Terpadu’ atau Patent One Stop Service (Paten OSS).

Kegiatan ini direncanakan akan memberikan pelayanan lebih baik ketimbang *workshop* penyelesaian substantif paten yang dilakukan pada 2023. Melalui kegiatan Paten OSS ini, pihaknya akan memberikan layanan langsung kepada masyarakat yang meliputi seluruh proses bisnis paten yakni mulai dari permohonan hingga pemberian sertifikat.

“Jadi *full team* dari direktorat kami turun ke daerah,” ujar Yasmon.





Adapun akan ada dua skema paten OSS. Pertama, skema sosialisasi yang akan memberikan informasi mulai dari tata cara permohonan paten, tata cara klasifikasi, penelusuran paten, pemeriksaan substantif paten, dan layanan konsultasi hukum bidang paten. Skema yang kedua, kegiatan penyelesaian substantif paten.

“Kegiatan ini membawa seluruh proses bisnis paten dari hulu hingga ke hilirnya,” kata Yasmon.

Pada tahun yang sama, Paten OSS akan diselenggarakan di 33 provinsi, lebih banyak dari kegiatan *workshop* pada 2023 yang sebanyak 12 provinsi. Yasmon berharap, dengan jumlah daerah yang lebih banyak, kegiatan ini dapat berdampak lebih signifikan ketimbang 2023.

Sampai dengan pekan kedua Maret 2024, pihaknya sudah menyelenggarakan Paten OSS ini di delapan provinsi yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sulawesi Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Maluku, dan Sumatera Utara. Artinya, sampai dengan akhir tahun ini masih akan ada 25 provinsi lagi yang akan dikunjungi dalam rangka paten OSS ini.

“Dari, pengalaman penyelenggaraan di delapan provinsi ini, sambutan dari para pemangku kepentingan di daerah ini luar biasa. Karena mereka betul-betul bisa mendapatkan layanan langsung dari direktorat kami berkaitan dengan seluruh proses bisnis paten dari hulu hingga hilir,” Yasmon mengungkapkan.

Selain Paten OSS, pihaknya juga akan melanjutkan program Patent Examiners Goes To Campus. Sebab, masih besar sekali potensi kekayaan intelektual di berbagai perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Menurutnya, saat ini baru sekitar 10-15 persen potensi paten yang tergarap. Selebihnya masih 85 persen lainnya yang belum terjangkau. Dengan berbagai sosialisasi masif, harapannya ke depan bisa mencapai 40 persen hingga 60 persen potensi paten yang bisa ditangani.

Tak hanya akan terus menjalankan program, pihaknya juga mendorong revisi Undang-Undang 13/2016 tentang Paten. Yasmon menjelaskan, rencana revisi itu sudah masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas). Presiden pun sudah mengirimkan surat presiden (Surpres) ke DPR. Artinya, ini tinggal menunggu pembahasannya saja di DPR.

“Kita butuh strategi besar dan sinergi antara direktorat dan kementerian lembaga untuk mencapai hal tersebut. Dengan kolaborasi, diharapkan bisa memberikan kebermanfaatannya yang luas bagi masyarakat kita,” tutup Yasmon.

DJKI Maksimalkan Sumber Daya Manusia Melalui Indonesian IP Academy

Pendirian Indonesian IP Academy diharapkan mampu menciptakan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi teknis tertentu.



Dra. Sri Lastami, S.T., M.IPL.
Direktur
Kerja Sama dan Edukasi

Sebagai lembaga yang memberi perlindungan terhadap kekayaan intelektual (KI), Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM (DJKI Kemenkumham) diharapkan dapat berperan meningkatkan kualitas hidup dan ekonomi masyarakat melalui KI. Apalagi, saat ini masih banyak tantangan yang harus dihadapi—salah satunya: kurang meratanya pemahaman tentang KI di seluruh lapisan masyarakat.

Besar peran KI untuk kehidupan masyarakat, meliputi semua bidang mata pencaharian masyarakat seperti petani, pekerja seni, penulis, pelaku UKM, akademisi, orang yang bekerja di bidang hukum, aparat penegak hukum, bahkan pelaku bisnis pabrikan yang

menggunakan teknologi yang rumit.

Pada 2023 DJKI berhasil melakukan kerja sama dan menandatangani MoU dengan World Intellectual Property Organization (WIPO). Direktur Kerja Sama dan Edukasi, Sri Lastami mengatakan, kerja sama tersebut merupakan langkah luar biasa yang dilakukan DJKI.

“Pada tahun 2023 DJKI bersama WIPO menandatangani MoU terkait Indonesian IP Academy. Nanti kami akan buat program belajar dan *learning system* jarak jauh sehingga masyarakat dari seluruh Indonesia bisa mengakses dan tentunya di-*support* oleh WIPO baik dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris,” ujar Lastami pada Senin (19/2).

Indonesian IP Academy ini akan menjalankan tiga fungsi utama yaitu *creation* (menggerakkan penciptaan kekayaan intelektual), *protection* (perlindungan hukum dan akuisisi kekayaan intelektual), dan *utilization* (pemanfaatan kekayaan intelektual).

Secara khusus, pendirian Indonesian IP Academy diharapkan mampu menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi teknis tertentu atau jabatan fungsional tertentu dalam bidang kekayaan intelektual. Di sisi lain, SDM tersebut juga harus memiliki kemampuan untuk memberikan pelatihan dan maupun pembangunan kapasitas SDM pemangku kepentingan lainnya.

“Kami berharap semakin banyak orang tahu, maka semakin banyak yang mendaftar. Ini nantinya bisa dimanfaatkan untuk kreativitas, desain, paten, hingga UMKM. Semua modul mudah dipahami karena menjangkau klaster UMKM, klaster anak sekolah, klaster penegak hukum, dan sebagainya. Tentunya diharapkan makin banyak yang sadar soal KI dan daftar ke DJKI,” Lastami melanjutkan.

Bukan ‘Program Semalam Jadi’

Sejak 2021, DJKI menandatangani MoU dengan UI-CSGAR tentang Penyusunan Studi Kelayakan Pengembangan Sarana dan Prasarana Kantor KI dan Pusat Informasi dan Pengembangan KI yang menghasilkan *grand desain* IP Academy.

Kemudian pada 2022, DJKI bekerja sama dengan Universitas Gadjah Mada (UGM) dalam penyusunan *blueprint* Kurikulum Kekayaan Intelektual. Pada 2023, DJKI

Kembali bekerja sama dengan UGM untuk penyusunan Modul Penunjang Kurikulum KI. Modul KI tersebut akan dibagi ke dalam beberapa modul pelatihan yaitu tingkat dasar, menengah, lanjut, dan tematik.

“Dari capaian di 2022 dan 2023 sudah kami siapkan termasuk modul-modulnya. Kemudian, pada 2024 ini kami akan berfokus pada *website* yang akan dibuat oleh DJKI sesuai arah WIPO. Nantinya *website* WIPO akan ditempelkan dan tersinkronkan dengan *website* milik DJKI. Jadi, masyarakat yang ingin mendaftar program ini bisa langsung melalui satu *website* DJKI,” Lastami menjelaskan.

Meski telah direncanakan dengan matang, Lastami tidak memungkirkan bahwa masih banyak hal yang harus dioptimalkan dalam program ini. Merujuk pada Korea dan China yang telah terlebih dahulu memiliki program ini, Lastami berharap ke depannya akan bertahap dilakukan program belajar *offline* dengan fasilitas yang serupa dengan

negara tersebut.

“Paling tidak kalau mau bagus, ya, kita harus meniru Korea dan China yang sudah punya *boarding* atau seperti *mess* untuk peserta yang belajar secara *offline*. Itu jadi lebih menarik, kan? Nanti kita siapkan juga bagi negara lain yang ingin belajar di Indonesia,” imbuh dia.

Secara bertahap Lastami mengatakan akan sampai ke tujuan tersebut dengan memaksimalkan program Indonesian IP Academy untuk dapat memfasilitasi peserta kelas *offline*. Namun, kini fokus utama program Indonesian IP Academy adalah memaksimalkan peran *trainer* agar mereka dapat mengajarkan calon *trainer* di bawahnya dengan penyelenggaraan *training of trainers* bagi calon pengajar KI di Indonesia.

“Terakhir juga akan kami siapkan perpustakaan. Namanya juga tempat belajar, jadi perpustakaan akan kami siapkan untuk mendukung hal tersebut,” kata dia.

Dengan bantuan dari banyak pihak, DJKI yakin dapat memperkenalkan Indonesian IP Academy lebih luas lagi. Sinergi antara lembaga dan *stakeholder* di Indonesia bisa menjadi salah satu kuncinya.

“Dengan mensinergikan banyak pihak, maka kita bisa memperkenalkan bahwa Indonesia memiliki Indonesian IP Academy yang dapat digunakan oleh banyak kalangan dan profesi,” pungkas Lastami.



Rabu, 20/12/23

DJKI dan UGM, siapkan kurikulum ki untuk ip academy

Foto :
DJKI

Program Unggulan 2023 Rampung, Ini Rencana Direktorat TI pada 2024

**Pada 2024
akan dilakukan
pengembangan
lebih jauh terkait
pemanfaatan AI di
mesin penelusuran.**



Dra. Dede Mia Yusanti, M.L.S.
Direktur
Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual

DJKI Kemenkumham Republik Indonesia terus berbenah untuk memberikan dukungan kerja penuh kepada satuan kerjanya. Sejumlah capaian mewarnai perjalanan Direktorat Teknologi Informasi DJKI Kemenkumham selama 2023.

Di bawah kepemimpinan Direktur Dra. Dede Mia Yusanti M.L.S, tercatat beberapa program unggulan yang berhasil direalisasikan pada 2023. Program unggulan tersebut di antaranya seperti ISO 20000-1 tentang Manajemen Layanan Teknologi Informasi dan ISO 27001 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi.

Pada Tahun Merek, DJKI meluncurkan Persetujuan Otomatisasi Pelayanan (POP) Merek yang terdiri atas perpanjangan merek, pencatatan lisensi, dan petikan resmi merek. Selain itu, aplikasi-aplikasi layanan DJKI sudah mulai stabil.

“Jadi dari paten dan desain industri itu sudah mulai lancar. Artinya bisa melayani masyarakat dengan lebih

baik,” ujar Dede.

Pada 2023, DJKI juga memperoleh dua penghargaan Top Digital Awards 2023 untuk nominasi *Top Digital Implementation 2023 #Star 5* dan *Top Leader on Digital Implementation 2023* yang diberikan kepada Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Min Usihen, S.H., M.H.

Penghargaan ini merupakan apresiasi dari kerja keras seluruh insan DJKI dalam meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik, terutama untuk kemajuan pelayanan publik berbasis teknologi digital yang lebih cepat dan responsif.

Dede mengungkapkan bahwa Direktorat Teknologi Informasi telah menyiapkan layanan *dashboard monitoring* yang memudahkan internal DJKI maupun kantor wilayah untuk melakukan kerja-kerja pelayanan publik di bidang *monitoring* permohonan kekayaan intelektual.

“Jadi sekarang ini *monitoring* kantor wilayah sudah sampai kabupaten. Bahkan jumlah PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang masuk tiap provinsi juga bisa dilihat di dalam *dashboard monitoring* tersebut,” Dede menambahkan.

Dede menegaskan bahwa secara umum beberapa program unggulan Direktorat Teknologi Informasi DJKI telah tercapai pada 2023. Tinggal bagaimana melakukan perawatan dan pengembangan terhadap aplikasi-aplikasi yang telah ada saat ini.

Kunci Keberhasilan

Kunci capaian Direktorat Teknologi Informasi saat ini menurut Dede tidak lepas dari kerja keras, inovasi, dan kreativitas semua pihak. Dirinya menyebutkan, pemanfaatan teknologi informasi secara maksimal ini ditujukan bagi internal DJKI maupun masyarakat luas pengguna sistem kekayaan intelektual.

“Mereka (masyarakat) ingin dalam mengajukan permohonan lancar, cepat, memuaskan mereka. Sehingga kita juga selalu berkomunikasi baik dari unit teknis, *user-user*-nya, unit pendukung lainnya, juga masyarakat luas seperti konsultan kekayaan intelektual,” imbuh Dede.

Dirinya mengakui, keberhasilan memperoleh ISO 20000-1, tak berarti seluruh layanan yang diberikan telah sempurna. Hal ini lebih pada bagaimana pihaknya memberikan manajemen pelayanan yang maksimal saat berhadapan dengan masalah layanan berbasis teknologi

informasi.

Adapun, kendala yang paling sering dihadapi adalah kegagalan atau ketidaksempurnaan dalam mengembangkan aplikasi. Tidak jarang, masa pengembangan sebuah aplikasi dapat berjalan dengan baik dan lancar, tetapi ketika telah digunakan *user*, baru muncul gangguan. Pada saat ini, sinergi antara Direktorat Teknologi Informasi dengan pihak pengembang aplikasi menjadi penting.

Pada kesempatan yang sama, Dede juga menyinggung terkait aplikasi IP Marketplace yang digarap oleh direktorat tempat dirinya bernaung. Menurut Dede, implementasi IP Marketplace nanti akan diselesaikan secara bersama-sama dengan Direktorat Kerja Sama.

“Saat ini, terdapat sejumlah perguruan tinggi menyatakan kesediaannya untuk ikut serta,” ujar Dede.

ilustrasi:
Freepik.Com

Saat ini pemanfaatan teknologi *artificial intelligence* (AI) telah digunakan untuk pemeriksaan penelusuran terkait merek, desain industri, dan paten. Rencananya, pada 2024 akan dilakukan pengembangan lebih jauh terkait pemanfaatan AI di mesin penelusuran.

Rencana ke Depan

Sebagai bagian dari rencana pengembangan, Dede mengungkap bahwa pada 2024 akan dilakukan pengembangan beberapa aplikasi seperti *dashboard monitoring* yang lebih informatif, penyediaan TKDL (Traditional Knowledge Digital Library), serta peningkatan database kekayaan intelektual komunal.

Pada 2024 akan dilakukan pengembangan beberapa aplikasi seperti *dashboard monitoring* yang lebih informatif, penyediaan TKDL (Traditional Knowledge Digital Library), serta peningkatan database kekayaan intelektual komunal.

“Nanti TKDL ini bisa digunakan oleh pemeriksa paten dalam melakukan penelusuran untuk permohonan paten dengan pengetahuan tradisional,” ujar Dede.

Selain itu, akan dilakukan perbaikan PDKI (Pangkalan Data Kekayaan Intelektual) dan penambahan fitur baru berupa data komunikasi antara pemeriksa dan pemohon. Dengan demikian, Masyarakat bisa mengetahui komunikasi antara pemeriksa dan pemohon kekayaan intelektual.

“Ini juga merupakan transparansi dari Dirjen KI ke masyarakat sehingga masyarakat bisa menilai bagaimana sih kinerjanya pemeriksa paten? Bener, enggak, dia melakukan pekerjaannya? Itu

bisa terlihat kalau kita melihat komunikasi antara pemeriksa dengan pemohon,” terang Dede.

Beberapa tambahan rencana pada 2024, Direktorat Teknologi Informasi pihaknya akan bekerja untuk mempertahankan sertifikasi ISO 20000-1 dan ISO 27001 yang telah dicapai; juga integrasi dan standarisasi data dalam rangka implementasi sistem pemerintah

berbasis elektronik. Ke depan, masyarakat cukup mengakses satu aplikasi dan memperoleh informasi data pemohon yang terintegrasi.

“Kerja sama dengan dukcapil juga penting. Dengan data yang terintegrasi, pemohon tidak perlu mengisi satu per satu. Jadi dia terintegrasi dengan data yang ada di dukcapil,” pungkas Dede.





Melindungi Kebebasan Berkreasi

Sudah nyaris tiga tahun terakhir Anom Wibowo berdiri di garda terdepan perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI). Pria yang menjabat sebagai Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (DJKI Kemenkumham) itu memikul tugas penting melindungi kepercayaan masyarakat agar tetap aman dan bebas dalam berkreasi.

Perannya sangat strategis. Seperti

dijelaskan Anom, kekayaan intelektual (KI) bukan hanya urusan mendukung kreativitas masyarakat dalam berinovasi, mengejar pencatatan (*filing*) KI, komersialisasi, dan menyetor penghasilan negara bukan pajak (PNBP) ke kas negara. Ada aspek penting lain yang perlu dijamin, yaitu perlindungan lewat penegakan hukum.

“Harus beriringan karena ini sebuah siklus. Kalau perlindungannya bagus, pasti kreativitas akan menonjol. Sebab, bagaimana orang mau berkreasi kalau mereka

tidak merasa terlindungi? Ibarat zaman dulu orang membuat lagu, rekaman resmi belum keluar, hasil bajakannya sudah keluar, kreativitas pun macet,” tutur perwira tinggi (pati) kepolisian itu beberapa waktu lalu.

Apalagi, seiring dengan bangkitnya kesadaran akan pencatatan kekayaan intelektual, potensi konflik yang menyertai semakin tinggi. Perkara KI bahkan sudah masuk kategori kejahatan transnasional (*transnational crime*).

“Seiring dengan bangkitnya kesadaran akan pendaftaran kekayaan intelektual, potensi konflik yang menyertai semakin tinggi. Perkara KI bahkan sudah masuk kategori kejahatan transnasional (*transnational crime*).”

“Kasus-kasus KI itu ada di peringkat empat kejahatan transnasional yang disebut *theft on IP crime* (pencurian KI) seperti membajak dan memalsukan barang. Jadi, bagaimanapun, perkara perlindungan KI ini sangat strategis,” katanya.

Sepanjang 2023, Anom beserta jajarannya di Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa telah berhasil memenuhi berbagai target kinerja. Dalam bidang permohonan mediasi, dari target awal 18 permohonan, sebanyak 22 permohonan telah dilayani. Itu terdiri atas masalah hak cipta (11 permohonan), merek (sepuluh permohonan) dan paten (satu permohonan).

Sementara, dari target 20 perkara aduan, 22 kasus dapat ditangani dari total 53 pengaduan yang

masuk sepanjang tahun lalu. “Telah dihentikan sebanyak 21 perkara dengan status surat perintah penghentian penyidikan pengawasan dan pengamatan (SP3 Wasmat) dan satu perkara dengan status SP3 Penyidikan. Jadi, target 20 perkara terlewati,” Anom menambahkan.

Sertifikasi Pusat Perbelanjaan

Selama 2023, Anom dan tim juga mengadakan 49 kegiatan pencegahan dari target 22 kegiatan. Salah satu program unggulannya adalah Sertifikasi Pusat Perbelanjaan Berbasis KI yang diselenggarakan se-Indonesia.

Program yang dijalankan sejak 2022 itu bertujuan memberantas perdagangan barang palsu di pusat perbelanjaan. Pasalnya, beberapa tahun terakhir, Indonesia masuk dalam radar Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat atau United States Trade Representative (USTR) dengan status *Priority Watch List* (PWL) akibat peredaran barang palsu dan bajakan yang cukup masif.

Sepanjang 2023, total 141 sertifikat pusat perbelanjaan baru yang diterbitkan kantor wilayah (kanwil) Kemenkumham di 32 provinsi. Ada pula perpanjangan sertifikasi sebagai tindak lanjut program tahun 2022. Jumlahnya 43 sertifikat di 14 provinsi.

Sepanjang 2023, ada total 141 sertifikat pusat perbelanjaan baru yang diterbitkan kantor wilayah (kanwil) Kemenkumham di 32 provinsi. Ada pula perpanjangan sertifikasi sebagai tindak lanjut program tahun 2022. Jumlahnya 43 sertifikat di 14 provinsi.

Anom Wibowo, S.I.K., M.Si
Direktur
Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa



Jumat, 13/10/23

DJKI lakukan edukasi dan sosialisasi pencegahan pelanggaran KI di itc mangga dua

Foto :
DJKI

“Ini memang butuh kesabaran karena rata-rata sudah nyaman menjual barang palsu dari merek terkenal. Apalagi, masyarakat kita pun masih banyak yang membeli,” ucapnya.

Anom menyoroti satu capaian berbeda yang berhasil dijalankan pada 2023, yakni sertifikasi Mangga Dua Mal untuk 32 *tenant* (penyewa). Pusat perbelanjaan itu tercatat oleh USTR sebagai proyek pilot (uji coba) dalam memberantas peredaran barang palsu di Indonesia.

Lewat program sertifikasi itu, Indonesia berhasil naik 12 level dalam indeks KI yang dipantau World Intellectual Property Organization (WIPO). “Ini melebihi ekspektasi, karena saat program ini dimulai di 2022, target sertifikasi pusat perbelanjaan itu hanya 34. Ternyata, tahun 2022 kita bisa selesaikan 43 sertifikasi dan tahun lalu sampai 141 sertifikasi,” kata Anom.

Kendala SDM

Perjalanan menuju berbagai capaian itu tentu tidak mudah. Ada berbagai kendala yang harus dihadapi Anom dan tim, khususnya dari segi birokrasi serta

ketersediaan dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di kanwil-kanwil.

Anom berpendapat, untuk menangani masalah kekayaan intelektual di berbagai wilayah, dibutuhkan personel penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) yang banyak dan berkapasitas mumpuni. Selama ini, urusan penegakan hukum terkait perkara KI masih sering dilempar ke pusat karena keterbatasan jumlah penyidik di wilayah.

Kebutuhan akan SDM penyidik yang banyak ini semakin mendesak. Sebab, kesadaran akan isu kekayaan intelektual sudah mulai tumbuh. Jumlah permohonan dan pengaduan perkara yang masuk pun semakin banyak.

“Kita butuh minimal satu tim PPNS (lima sampai enam orang di satu unit) di semua kanwil untuk mengatasi masalah di wilayah. Urusan perkara yang besar atau berskala internasional baru ditangani pusat,” Anom melanjutkan.

Tak hanya itu, kapasitas PPNS juga perlu ditingkatkan. Idealnya, menurut Anom, penyidik mendapat pelatihan minimal dua tahun sekali

untuk menyegarkan ingatan dan memperkaya pengetahuan mereka seputar penanganan perkara.

“Penyidik harus selalu dilatih. Kalau tidak pernah berpengalaman menangani perkara, mereka akan takut berhadapan dengan perkara dan setiap masalah selalu dilarikan ke pusat,” tutur Anom.

Untuk tahun ini, target yang dipasang direktoratnya masih sama dengan tahun lalu, yaitu menyelesaikan 20 perkara aduan. Namun, kali ini, ada tambahan ‘tabungan’ 53 perkara yang harus ditangani. Anom melihat tambahan perkara itu sebagai bentuk kepercayaan masyarakat kepada DJKI yang harus dijaga.

“Perkara yang banyak itu bukan berarti belum ditangani, tetapi karena tingginya trust dari masyarakat yang semakin banyak mengadu ke kita. Agar kepercayaan itu tidak turun, semua perkara harus kita tangani sebaik mungkin. Untuk itu, harapannya, kami tidak hanya di-*support* dari sisi tambahan anggaran, tetapi juga personel,” pungkas Anom.

Direktorat Merek dan Indikasi Geografis Raih Sejumlah Capaian Positif pada 2023



Banyak target dan program unggulan Direktorat Merek dan Indikasi Geografis tercapai pada 2023.

Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menyatakan, pemerintah menargetkan hadirnya merek unggulan dari setiap desa di Indonesia. Oleh karena itu, Kemenkumham mencanangkan 2023 sebagai Tahun Merek.

Maklumat dari Kemenkumham itu dijalankan dengan maksimal sehingga menghasilkan capaian yang gemilang. Selama 2023, Direktorat Merek dan Indikasi Geografis telah berhasil memenuhi target capaian kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

Sejumlah program unggulan, yaitu One Village One Brand atau OVOB dan Geographical Indication (GI) Drafting Camp yang dipadukan dengan Mobile IP Clinic, menunjukkan korelasi positif terhadap peningkatan realisasi layanan pendaftaran indikasi geografis pada 2023.

Ada peningkatan lebih dari 50%, sementara untuk pengawasan indikasi geografis cenderung meningkat dari 2021 hingga 2023.

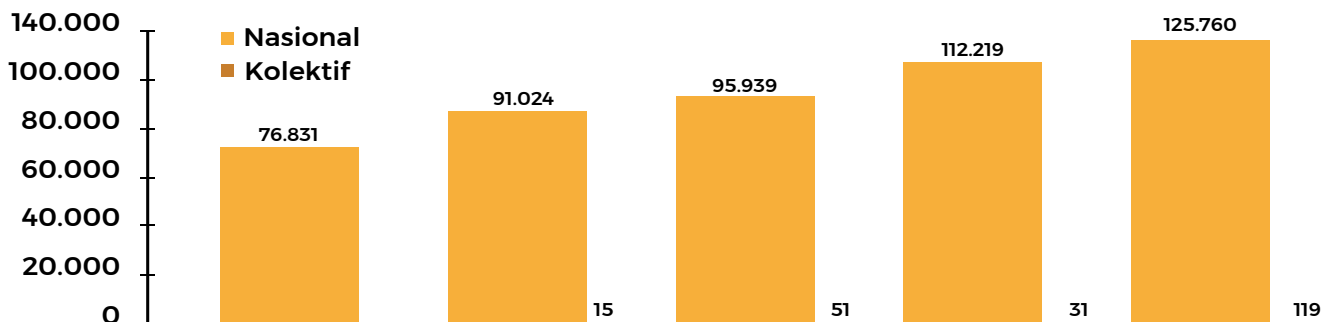
Sejumlah program unggulan, yaitu One Brand One Village atau OVOB dan Geographical Indication (GI) Drafting Camp yang dipadukan dengan Mobile IP Clinic, menunjukkan korelasi positif terhadap peningkatan realisasi layanan pendaftaran indikasi geografis pada 2023.

“Capaian positif selama pelaksanaan Tahun Merek adalah terlaksananya OVOB di 33 provinsi. DJKI juga telah menerima 119 permohonan merek kolektif dibandingkan dengan 2022 yang hanya berjumlah 31 permohonan merek kolektif,” Direktur Merek dan Indikasi Geografis Kurniaman Telaumbanua menerangkan.

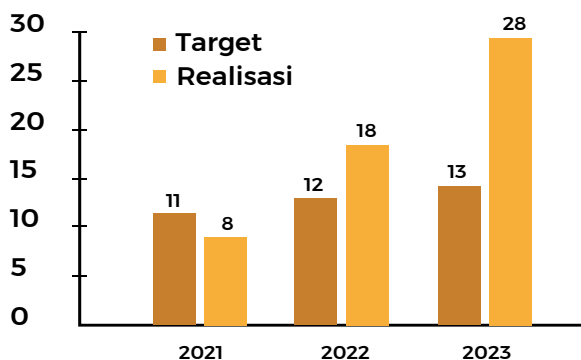
Kurniaman mengatakan, program GI Drafting Camp, diadakan di beberapa wilayah yang memiliki jumlah permohonan maupun potensi permohonan indikasi geografis terbanyak, khususnya di wilayah timur Indonesia. Dari program ini, terdapat 18 permohonan yang diikutsertakan dalam kegiatan yang berkontribusi terhadap peningkatan signifikan realisasi target kinerja untuk penyelesaian layanan pendaftaran indikasi geografis.

“Secara umum selama 2023, kami telah mencapai seluruh target. Seperti penyelesaian permohonan merek dan indikasi geografis pada 2019 hanya 137.676. Sementara itu pada 2023 capaiannya hingga 180.206. Total target capaian kami pada 2023 sebanyak 17% dengan persentase capaiannya adalah 30,89%,” imbuh Kurniaman.

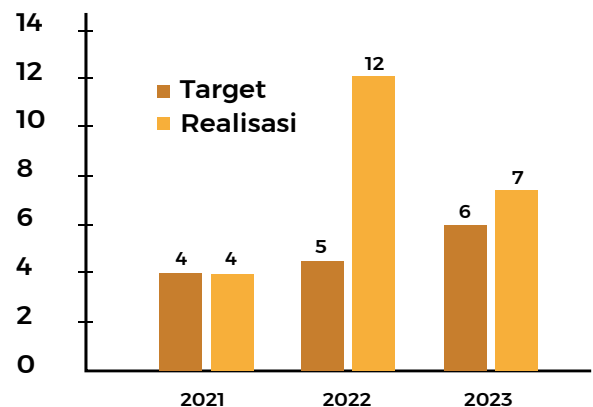
Permohonan Merek 2019 - 2023



Layanan Pendaftaran IG



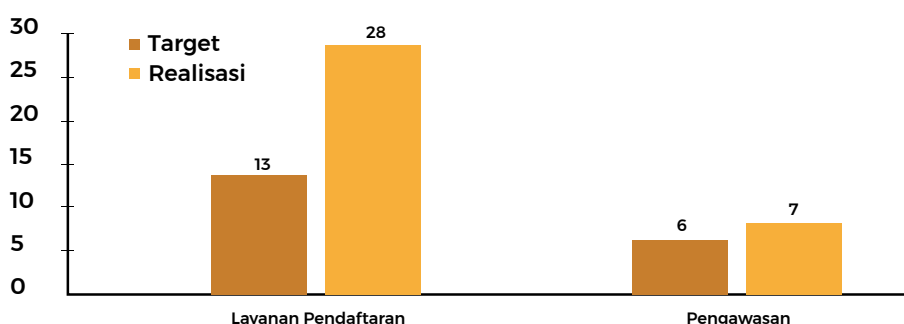
Pengawasan IG Terdaftar



Penyelesaian permohonan merek dan indikasi geografis pada 2019 hanya 137.676. Sementara itu, pada 2023 capaiannya hingga 180.206. Total target capaian kami pada 2023 sebanyak 17% dengan persentase capaiannya adalah 30,89%.

Penyelesaian Permohonan Merek & IG Tahun 2019 (<i>baseline</i>)	Penyelesaian Permohonan Merek & IG Tahun 2023	Target Capaian 2023	Persentase Capaian 2023
137.676	180.206	17%	30,89%

Target dan Realisasi Perkin Tahun 2023 Indikasi Geografis



Bukan Kerja Semalam

Capaian fantastis itu tentu tidak didapat dalam semalam. Kurniaman mengakui bahwa terdapat program kerja yang jelas dan terencana dengan baik untuk mendukung pencapaian perjanjian kinerja pada 2023. Dibutuhkan juga kerja sama yang sinergis antara DJKI dengan kantor wilayah, serta dukungan anggaran yang memadai untuk mewujudkan pelaksanaan setiap program.

“Asistensi dan fasilitasi yang intensif yang dilakukan oleh DJKI dan kantor wilayah dengan para pemangku kepentingan merek dan indikasi geografis merupakan salah satu tercapainya target ini. Tidak lupa keahlian dari tim ahli indikasi geografis yang telah memiliki pengalaman belasan tahun dalam melakukan asistensi dan pemeriksaan indikasi geografis juga berperan di sini,” kata Kurniaman.

Meski pada akhirnya mencapai target, Kurniaman tidak menampik menghadapi berbagai aral. Misalnya, masih kurangnya pemahaman para pemangku kepentingan akan perlindungan indikasi geografis dan maupun sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung sistem perlindungan indikasi geografis ini.

Capaian baik pada 2023 tidak serta merta dibiarkan begitu saja. Kurniaman mengatakan perlu pelatihan lanjutan mengenai teknik meningkatkan kualitas dan kompetensi pegawai di lingkungan Direktorat Merek dan Indikasi Geografis.

Setelah Menteri Kumham Yasonna H. Laoly menutup Tahun Merek 2023, Kemenkumham telah mencanangkan 2024 sebagai Tahun Indikasi Geografis. Hal ini merupakan upaya DJKI Kemenkumham mempromosikan produk unggulan daerah.

Selain melakukan pembenahan internal, pada 2024 ini Direktorat Merek dan Indikasi Geografis akan masif memberikan informasi kekayaan intelektual sejak dini kepada kampus, sekolah, hingga tempat perniagaan yang dapat melahirkan produk lokal Indonesia.

2024 akan banyak penyusunan dan penyempurnaan di beberapa dokumen, di antaranya SOP terkait Perubahan Orta (Permenkumham No. 28 Tahun 2023); Juklak dan Juknis Pemeriksaan Substantif Merek; Quality Management System pada Pemeriksa Merek; panduan penyederhanaan dokumen deskripsi bagi para pemohon; penyusunan juklak dan juknis pengawasan indikasi geografis; diseminasi dan promosi indikasi geografis; dan melanjutkan program-program yang berhasil mendukung capaian kinerja di tahun ini untuk tetap dilaksanakan tahun-tahun berikutnya,” kata dia.

Setidaknya terdapat tiga target utama dari banyaknya penyusunan dan penyempurnaan teknis yang akan dicapai pada 2024, Ini meliputi penyusunan juknis pemeriksaan dengan pembentukan *quality management system* dalam proses pemeriksaan substantif merek dan petunjuk teknis pemeriksaan merek yang diajukan melalui Protokol Madrid; percepatan *first pendency period* pemeriksaan permohonan merek menjadi enam bulan, serta rencana pembentukan tim pembinaan indikasi geografis nasional dan *roadmap* indikasi geografis nasional; Geographical Indications Goes to Marketplace, dan Forum IG Nasional.

Dalam penjelasan Kurniaman, GI Goes To Marketplace merupakan program unggulan pada 2024 bertujuan untuk meningkatkan *engagement* dan penjualan produk indikasi geografis; perluasan pasar produk melalui *marketplace*; serta mendorong pertumbuhan indikasi geografis yang dilindungi.

"Kami juga akan segera membentuk tim pembinaan produk indikasi geografis. Saat ini baru 123

produk yang terdaftar. Berdasarkan yang terdaftar banyak ditemukan kendala dan permasalahan. Kendala dan permasalahan tersebut bisa diatasi apabila peran kementerian/lembaga terkait dapat dimaksimalkan dengan baik," imbuh Kurniaman.

Atas hal tersebut ia memandang perlu dilakukan pembentukan MoU dengan kementerian maupun lembaga terkait dan segera membentuk satuan tugas yang terdiri atas personel kementerian/ lembaga terkait serta perwakilan Asosiasi Indikasi Geografis Indonesia, sebagai tindak lanjut pembentukan MoU.

Menyadari masih rendahnya kesadaran masyarakat Indonesia akan ekosistem indikasi geografis, Direktorat Merek dan Indikasi Geografis juga akan melaksanakan program unggulan Forum Indikasi Geografis Nasional yang bertujuan untuk memperkenalkan indikasi geografis kepada masyarakat Indonesia secara masif.

"Kami berupaya untuk meningkatkan *awareness* melalui pertemuan antara pemerintah

pusat dan pemerintah daerah, pemilik indikasi geografis, dan pemangku kepentingan indikasi geografis dalam rangka mendiskusikan isu-isu terkini, permasalahan, kebijakan, dan hal-hal teknis lainnya terkait indikasi geografis yang pelaksanaannya dapat dilakukan dalam bentuk FGD, seminar/*workshop*, *coaching clinic*, dan sharing pengalaman," lanjut Kurniaman.

Dengan mengimplementasikan strategi-strategi yang tepat, Kurniaman optimis dapat mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Mengelola sumber daya dengan bijaksana, meningkatkan partisipasi aktif, membangun kemitraan dan kolaborasi, serta penguatan kapasitas merupakan langkah strategis dalam pelaksanaan program kerja.

Adapun dalam menghadapi keterbatasan sumber daya, Direktorat Merek dan Indikasi Geografis akan melakukan pengelolaan yang efektif dengan melakukan pemetaan dan prioritas pelaksanaan program berdasarkan kebutuhan.



Kurniaman Telaumbanua, S.H., M.Hum
Direktur
Merek dan Indikasi Geografis

Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri, Berjibaku dari Kampus ke Kampus

Banyak target dan program unggulan Direktorat Merek dan Indikasi Geografis tercapai pada 2023.

Sepanjang tahun lalu, Direktur Hak Cipta dan Desain Industri Anggoro Dasananto beserta tim gencar berkeliling kampus-kampus di tanah air. Mereka punya satu misi penting: menjangkau potensi permohonan hak cipta dan desain industri sebanyak-banyaknya dari kalangan *civitas academica*.

Upayanya tidak sia-sia. Divisi yang Anggoro pimpin di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (DJKI Kemenkumham) itu berhasil mencapai target yang dicita-citakan. Sepanjang 2023, total permohonan desain industri meningkat sebesar 29,36 persen. "Ini salah satunya disebabkan oleh program kegiatan DI (Desain Industri) Menjelajah Kampus," kata Anggoro.

Pada 2022, jumlah permohonan desain industri yang tercatat sebanyak 4.877, sedangkan 2023 meningkat menjadi 6.309 permohonan. Keberhasilan menembus angka 6.000 permohonan itu menjadi capaian baru yang berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Bukan hanya desain industri, urusan hak cipta pun menorehkan kinerja yang memuaskan. Jumlah permohonan hak cipta pada 2023 naik 21,2 persen, dari 117.083 permohonan pada 2022 menjadi 141.980 permohonan pada 2023.

"Target tahun 2023 tercapai, terlihat dari penyelesaian permohonan hak cipta dan desain industri yang melebihi target. Secara total, target tercapai 218 persen untuk hak cipta, dan 113 persen untuk desain industri," ucap Anggoro. Kesadaran mendaftarkan hak desain industri di dunia perguruan tinggi bagi akademisi, periset, atau peneliti memang sangat penting. Hak desain industri dapat



memberikan perlindungan terhadap penyalahgunaan atau duplikasi. Tanpa perlindungan hak desain industri, ketika invensi itu masuk ke dunia industri, pihak lain bisa menggunakan dan menirunya dengan mudah untuk mencari keuntungan.

Untuk itulah, mulai 2023, Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri menginisiasi kegiatan Jelajah Kampus untuk menyasar dosen dan peneliti yang terlibat dalam invensi produk. Namun, selazimnya program yang baru pertama kali dieksekusi, ada macam-macam kendala yang harus dihadapi.

Penyelesaian permohonan merek dan indikasi geografis pada 2019 hanya 137.676. Sementara itu, pada 2023 capaiannya hingga 180.206. Total target capaian kami pada 2023 sebanyak 17% dengan persentase capaiannya adalah 30,89%.

Sebut saja, kesulitan mencari peserta potensial di lingkup perguruan tinggi dan universitas yang bisa langsung mendaftarkan permohonan hak desain industri. Ada pula kendala pembiayaan karena minimnya fasilitas dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) di perguruan tinggi.

Tak hanya itu, kendala juga terletak pada perencanaan kegiatan yang terganggu karena faktor anggaran dan sumber daya. Akibat keterbatasan itu, ada banyak

universitas lain yang sebenarnya potensial untuk didampingi, tetapi untuk sementara ini belum bisa difasilitasi untuk mendaftarkan hak desain industri.

“Anggaran yang terbatas juga membuat jumlah narasumber yang akan melakukan pendampingan (di kampus-kampus) tidak berimbang dengan jumlah peserta yang ingin melakukan konsultasi pendaftaran. Ada juga isu teknis saat proses pendampingan pendaftaran desain industri, seperti kendala jaringan,” tutur Anggoro.

Perencanaan Terukur

Meski banyak kendala yang mesti dihadapi, pada 2024, Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri tetap melanjutkan program Jelajah Kampus. Harapannya, lebih banyak universitas yang bisa dikunjungi sebagai peserta untuk menjangkau potensi permohonan desain industri sebanyak-banyaknya.

Salah satu hal yang akan diperbaiki adalah menyusun perencanaan kegiatan dengan menggunakan azas pembiayaan yang efektif dan efisien. Artinya, program mesti didesain sesuai dengan ketersediaan anggaran. “Anggaran yang keluar harus bisa mendapat hasil yang maksimal,” kata Anggoro.

Hal itu bisa dicapai dengan menyasar target peserta secara terukur sesuai kebutuhan. Dengan demikian, capaian hasilnya pun lebih terarah, yakni untuk mendorong pemahaman masyarakat dalam bidang hak cipta atau desain industri. Tantangan berikutnya, bagaimana mendapatkan permohonan untuk didaftarkan ke DJKI sebanyak-banyaknya langsung saat kegiatan dilaksanakan.”

Secara umum, Anggoro menargetkan, jumlah permohonan desain industri maupun hak cipta yang masuk pada 2024 ini bisa meningkat signifikan. Seiring



Anggoro Dasananto, S.H.
SEKRETARIS
Sekretariat

dengan itu, jumlah penyelesaian permohonan juga diharapkan bisa ditingkatkan dan rampung sesuai target waktu yang ditentukan.

Untuk mencapai target itu, Sistem Persetujuan Otomatis Pencatatan Hak Cipta (POP HC), yang berfungsi sebagai sistem daring untuk mengurus administrasi perlindungan hak cipta, akan dibenahi agar lebih efektif. Salah satunya, dengan memperkuat peraturan pendukung sistem pencatatan tersebut.

Selain melanjutkan program Jelajah Kampus, Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri juga akan meningkatkan kolaborasi dengan kementerian/lembaga lain. Kerja sama itu akan dimulai dengan merumuskan dan mengelola access and benefit-sharing antara DJKI dengan kementerian/ lembaga lain terkait data Kekayaan Intelektual Komunal (KIK).

Baru-baru ini, kerja sama itu sudah dimulai dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag). “Kemendag banyak mendukung pendaftaran desain industri untuk usaha kecil menengah (UKM) yang menjadi binaannya. Jadi, kolaborasi yang efektif seperti ini yang ke depan akan kita perkuat,” pungkas Anggoro.

Cara Kita Lindungi Identitas dan Warisan Lewat Indikasi Geografis

Pendaftaran indikasi geografis memberikan kepastian dalam perlindungan hukum dan kepemilikan atau identitas suatu produk. Inilah yang menjadi barometer terhadap penegakan hukum, jika ada pemalsuan.

Selalu ada cerita di balik tiap sentuhan produk berkualitas. Ia menjadi pengantara tradisi, warisan, maupun keunikan geografis yang khas dengan para konsumennya. Melalui label indikasi geografis (IG) yang melekat, kita bisa paham, nilai sebuah produk tidaklah sekadar merek.

Pun dengan indikasi geografis yang merupakan cerminan dari kekayaan budaya, iklim, dan tanah asal produk tersebut.

Kita dapat membayangkan perjalanan panjang yang harus dilalui sebuah produk untuk bisa sampai ke tangan. Dari ladang,

kebun, atau perairan, proses pengolahan, hingga distribusinya. Untuk memahami lebih dalam indikasi geografis, kami telah melakukan wawancara dengan Ketua Tim Kerja Layanan Sertifikasi, Mutasi, Lisensi, dan perpanjangan Merek, Saky Septiono. Berikut adalah paparannya.



Apa yang dimaksud dengan indikasi geografis?

Indikasi geografis adalah suatu tanda yang dipakai dalam perdagangan untuk melindungi nama asal suatu barang. Beberapa contoh produk indikasi geografis di antaranya kopi Kintamani Bali, Kopi arabika Gayo, atau beragam batik yang berasal dari Yogyakarta atau Solo.

Bagaimana kriteria suatu produk bisa menjadi indikasi geografis?

Suatu produk yang memiliki ciri khas dan kualitas, karena faktor alam dan manusia, yang kemudian membentuk suatu reputasi, terhadap kepopuleran produk tersebut. Dengan demikian, sekalipun satu produk memiliki nama daerah asal atau penghasil, ia belum tentu menjadi produk indikasi geografis tanpa memenuhi syarat tersebut. mendaftarkan indikasi geografis.

Siapa yang berhak memiliki indikasi geografis?

Indikasi geografis bukan merupakan hak perseorangan, tetapi hak kolektif yang dimiliki masyarakat suatu tempat. Masyarakat di sini dapat berupa petani, pedagang, bahkan pengolah produk. Secara bersama-sama, masyarakat yang memiliki kriteria tersebut dapat mendaftarkan indikasi geografis.

Apa keuntungan masyarakat dan pemerintah daerah jika mendaftarkan indikasi geografis?

Pertama, ada kepastian dalam perlindungan hukum. Kepastian ini tentang kepemilikan suatu nama, sehingga dampak indikasi geografis nantinya dapat menjadi suatu barometer terhadap penegakan hukum. Kalau kita lihat, ada banyak produk yang dijual dengan kata 'kopi Toraja', mungkin saja belum tentu berasal asli dari Toraja. Indikasi geografis tidak hanya memberikan perlindungan terhadap penggunaan nama, tetapi juga ciri khas dan kualitas dari produk tersebut.

”
Indikasi geografis bukan merupakan hak perseorangan, tetapi hak kolektif yang dimiliki masyarakat suatu tempat.
 ”



Mengenal 3 Produk Indikasi Geografis di Indonesia



”

Dengan tercatat sebagai indikasi geografis, sebuah produk dapat memiliki standar produksi dan secara jelas diidentifikasi, berdasarkan karakternya yang khas dan unik.

”

Pada dasarnya, indikasi geografis merupakan sebuah tanda dalam perdagangan yang menunjukkan daerah asal suatu barang. Tanda ini, bisa berupa nama tempat, daerah, wilayah, kata, gambar, huruf, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut. Kopi Kintamani dan kopi arabika Gayo, misalnya.

Agar sebuah barang atau produk dapat menjadi indikasi geografis, harus didaftarkan oleh lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan produk berupa sumber daya alam, barang kerajinan tangan, atau hasil industri. Pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota juga dapat mendaftarkan barang atau produk

tersebut. Nah, pemakai indikasi geografis adalah pihak yang mendapat izin dari pemegang hak atas indikasi geografis yang terdaftar untuk mengolah dan/atau memasarkan barang dan/atau produk indikasi geografis.

Label indikasi geografis ini dapat menjadi perlindungan bagi barang atau produk yang didaftarkan. Dengan tercatat sebagai indikasi geografis, sebuah produk dapat memiliki standar produksi dan secara jelas diidentifikasi, berdasarkan karakternya yang khas dan unik. Tak hanya itu, reputasi suatu kawasan indikasi geografis ini juga akan terangkat dan berdampak positif pada pengembangan agrowisata di daerah tersebut.

Kayu Manis Koerintji Jambi, Sumatera



Kayumanis Koerintji Jambi (MPIG-K2J) berupa kulit kayu berwarna coklat muda hingga coklat tua, beraroma harum dan tajam, berasa manis, sedikit pedas.

Indonesia adalah negara yang paling banyak mendatangkan kayu manis ke seluruh dunia.



Pemerintah berusaha agar Kayumanis Koerintji menjadi produk indikasi geografis untuk mendongkrak harga kayu manis.

Budidaya kayu manis di Kerinci terancam punah, disebabkan oleh harga bagi para petani tidak sesuai dengan kebutuhan hidup sehari-hari mereka.

Cabai Hiyung Tapin, Kalimantan Selatan



Nama 'Hiyung' diambil dari nama sebuah desa di Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan yang telah lama dikenal sebagai daerah budidaya cabai.

Disebut sebagai salah satu cabai terpedas di Indonesia.

rata-rata produksi cabai Hiyung sekitar empat hingga sembilan ton per tahun.



Bentuk cabainya khas, yaitu kerucut kecil, warna hijau muda (saat masih muda), hijau keunguan menjelang masak, dan merah cerah saat masak.

Kakao Berau, Kalimantan Timur



Masyarakat Kabupaten Berau mulai membudidayakan tanaman kakao ini sejak 1989, dengan membuka kebunnya di Kampung Nyapa, Desa Long Lanuk

Budidaya tanaman yang bijinya berwarna coklat muda ini sebenarnya tersebar di sembilan wilayah kecamatan



Aroma dan rasanya khas: seperti kacang, buah segar, sepat, dan pahit.

Pengelolaan Kakao Berau ini dapat menjadi penopang perekonomian petani di daerah Kabupaten Berau



CEK PDKI DULU, SEBELUM DAFTARIN MEREKMU!

Kunjungi PDKI-INDONESIA.DGIP.GO.ID
agar tahu merek Anda memiliki persamaan
dengan merek yang sudah terdaftar
sebelumnya.





CAPAIAN KINERJA DJKI

TAHUN 2023

Target DJKI pada 2023

1. Meningkatkan jumlah permohonan kekayaan intelektual.
2. Meningkatkan jumlah kekayaan intelektual nasional yang dilindungi.
3. Menyelesaikan penanganan aduan pelanggaran kekayaan intelektual.
4. Menyelesaikan permohonan kekayaan intelektual.



Media HKI Meraih
BRONZE WINNER

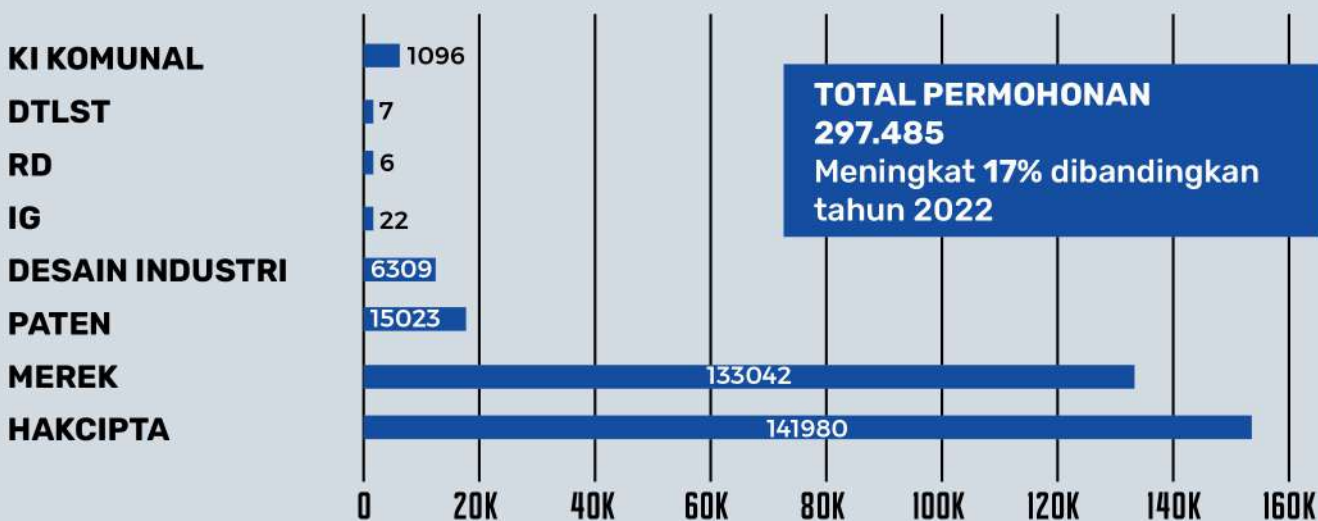


Top Digital Implementation 2023



Top Leader on Digital Implementation 2023

Jumlah Permohonan Kekayaan Intelektual 2023



Capaian Kinerja Administrasi



SERTIFIKASI ISO



INOVASI DJKI TAHUN 2023

Persetujuan Otomatis Permohonan atau POP Merek yang memberikan **persetujuan otomatis** bagi perpanjangan merek, pencatatan lisensi, serta petikan resmi merek. Inovasi ini menjamin kenyamanan dan efisiensi para pemilik merek dalam melindungi merek terdaftar miliknya.



Program Mobile IP Clinic

Mobile IP Clinic telah berlangsung sebanyak **49 kegiatan** di **33 provinsi** selama tahun **2023**. Kegiatan yang diikuti oleh **13.976 peserta** ini telah mendorong dibukanya **26 unit layanan** kekayaan intelektual baru di Mall Pelayanan Publik di seluruh Indonesia.



Sertifikasi Pusat Perbelanjaan

183 Pusat Perbelanjaan Tersertifikasi di **31 Provinsi**



Program One Village, One Brand

Pada tahun 2023, DJKI telah menerima **99 permohonan merek kolektif** dari berbagai provinsi di tanah air. Pada tahun 2022 hanya sebesar **29 permohonan** saja.



Program Paten

Patent Examiner Go to Campus sudah terlaksana di **10 Perguruan Tinggi**. **Bimbingan Teknis** Terkait Sistem Penelusuran dan Pemanfaatan Informasi Paten serta pendampingan Penelusuran Paten yang sudah berlangsung di **33 provinsi** dan diikuti oleh **1331 penerima manfaat**.



Program KUMHAM GOES TO CAMPUS

Melalui Kumham Goes to Campus, DJKI mensosialisasikan **Rancangan Perubahan Undang-Undang Paten** dan **Rancangan Undang-Undang Desain Industri** kepada para civitas akademika di perguruan tinggi serta aparat penegak hukum di **16 kota**.



KONTRIBUSI PNBP DJKI

Capaian PNBP DJKI
di tahun 2023 sebesar

RP 879.477.718.946

**LEBIH TINGGI
9.71 %**

tahun 2022
(Rp 801.635.672.800)

15

INDIKASI
GEOGRAFIS
LUAR NEGRI

123

INDIKASI
GEOGRAFIS
DALAM NEGRI

138

INDIKASI
GEOGRAFIS
INDONESIA

1096

PERMOHONAN
KIK

820^{KIK}

TERVALIDASI

539^{KIK}

Memiliki
Potensi
Ekonomi

Menangani

128

Aduan

53

Laporan Aduan
Pelanggaran
Kekayaan
Intelektual

Menyelesaikan

22

Aduan

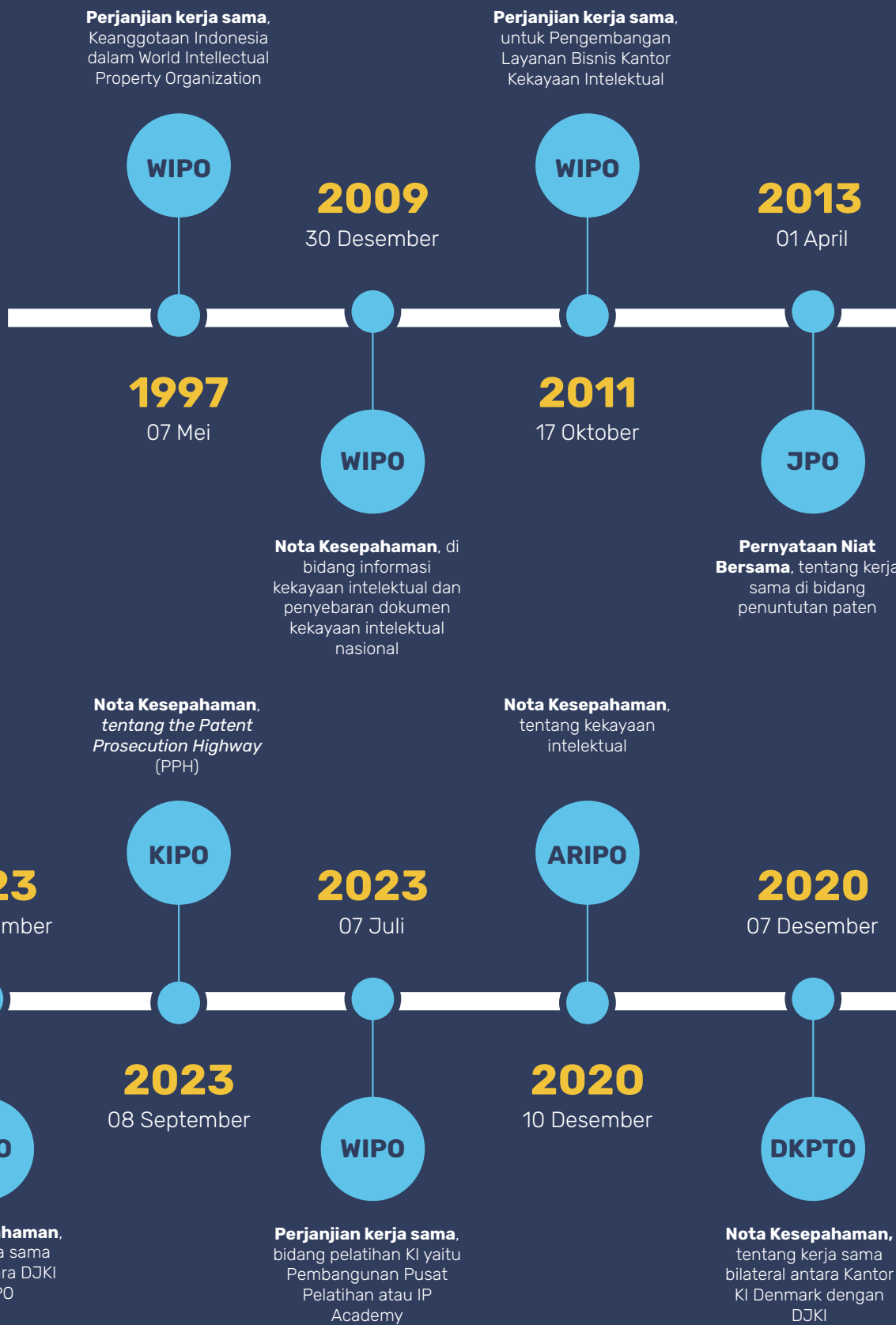
491

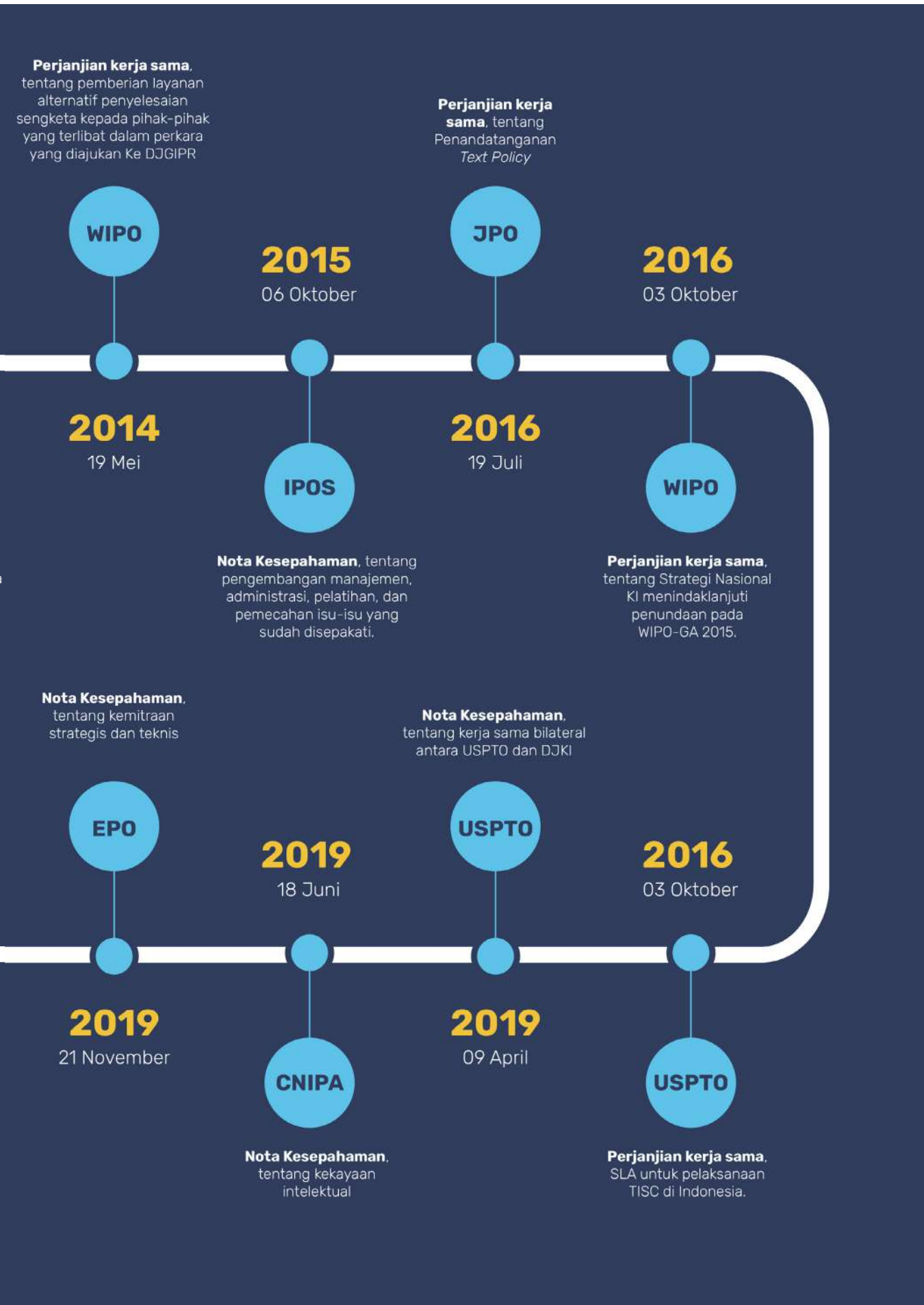
Laporan Aduan
Penutupan Situs
yang Melanggar KI

430

Penutupan Situs
Tersebut
Ke Kominfo

**DATA KERJA SAMA
DJKI 2009-2023**





SAPA DAERAH



DJKI Mendengar Hadir di Universitas PGRI Yogyakarta, Berikan Edukasi KI pada Generasi Muda



DIY

05 Maret 2024

Yogyakarta - Kanwil Kemenkumham DIY menyelenggarakan kegiatan DJKI Mendengar di Universitas PGRI Yogyakarta, Selasa (5/4). Kegiatan ini bertujuan memberikan edukasi dan pemahaman tentang kekayaan intelektual kepada generasi muda, khususnya mahasiswa.

Kegiatan DJKI Mendengar merupakan salah satu bentuk komitmen Kemenkumham dalam meningkatkan edukasi dan pemahaman tentang KI kepada masyarakat. Diharapkan dengan kegiatan ini, generasi muda dapat lebih kreatif dan inovatif dalam menghasilkan karya-karya yang bernilai ekonomi tinggi.

Suksesan F1H20 Danau Toba 2024, Kanwil Sumut Gelar Pameran dan Sosialisasi Layanan Pendaftaran Perseroan Perorangan dan KI



Sumatra Utara

01 Maret 2024

Balige - Indonesia terpilih kembali sebagai tuan rumah ajang balap perahu super cepat atau F1H20 (F1 Powerboat) pada 2024. Dunia Perahu Motor Formula 1 (F1H20) kembali digelar pada tanggal 1 hingga 3 Maret 2024 di Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Danau Toba tepatnya di kawasan Balige, Sumatra Utara. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatra Utara turut berpartisipasi dengan menyelenggarakan pameran pada perhelatan bertaraf internasional tersebut.

Pertama di Banten, Rambutan Parakan Sah Tercatat Sebagai Indikasi Geografis Kabupaten Tangerang



Banten

25 Maret 2024

Serang - Rambutan Parakan resmi tercatat sebagai Indikasi Geografis asal Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Pada 19 Maret 2024, Tim Ahli Indikasi Geografis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) melakukan pembahasan hasil pemeriksaan substantif atas lima permohonan indikasi geografis, yang salah satunya adalah Rambutan Parakan.

Kemenkumham Bengkulu Serahkan Sertifikat KIK Sambal Lokan pada Bupati Mukomuko



Bengkulu

25 Februari 2024

Kab. Mukomuko - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Suriyanti beserta tim menghadiri Upacara Hari Jadi Kabupaten Mukomuko ke-21 Tahun 2024 di halaman Kantor Bupati Mukomuko. Setelah pelaksanaan upacara, dilaksanakan penyerahan Sertifikat Kekayaan Intelektual Komunal Sambal Lokan dari Kanwil Kemenkumham Bengkulu.

Kolaborasi Bersama Disperindag, Kanwil Kemenkumham Sulteng Terbitkan 45 Sertifikat Merek KI bagi Pelaku Usaha Lokal



Sulawesi Tengah

20 Februari 2024

Palu - Berkolaborasi bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Kanwil Kemenkumham Sulteng terbitkan 45 sertifikat merek atas hak kekayaan intelektual (HKI) bagi pelaku usaha lokal di Sulteng, Selasa, (20/2) siang.

Sertifikat merek tersebut diserahkan secara langsung oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham Sulteng, Hermansyah Siregar kepada Kepala Bidang Pengembangan dan Sumber Daya Industri Disperindag Provinsi Sulteng, Eko Mardiono.

Kemenkumham Kalsel Serahkan Sertifikat Merek UMKM Binaan Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Kulik Potensi IG Daerah



Kalimantan Selatan

18 Maret 2024

Banjarmasin - Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Selatan serahkan sertifikat merek UMKM Binaan Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang diterima langsung oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada Senin (18/2).

Penerbitan sertifikat merek ini merupakan pendaftaran merek UMKM Binaan Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada 2022. Pada kesempatan ini, Ramlan Harun menjelaskan tentang indikasi geografis, mengingat 2024 telah ditetapkan sebagai Tahun Indikasi Geografis.

Penyerahan Sertifikat Hak Cipta, Bukti Komitmen Kemenkumham Sulut dalam Pelindungan HKI



Sulawesi Utara

19 Maret 2024

Manado - Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Utara, John Batara menyerahkan sertifikat hak cipta atas karya seni batik desain batik tradisional khas Bolaang Mongondow Timur kepada Bupati Bolaang Mongondow Timur, Sam Sachrul Mamonto di ruang rapat Kakanwil, Selasa (19/3).

Penyerahan sertifikat tersebut didampingi oleh para kepala divisi. Sebelumnya, Plh. Kakanwil menyatakan bahwa kekayaan intelektual memiliki peran penting dalam mendukung daya saing bangsa, dan penyerahan sertifikat tersebut adalah bentuk perlindungan hukum bagi para pencipta karya.

Hargai Seniman di Tanah Papua, Kakanwil dan Wakil Bupati Nabire Serahkan 5 Sertifikat Hak Cipta



Papua

6 Februari 2024

Papua - Wem Mesido sangat berterima kasih telah menerima lima sertifikat sebagai pencipta lagu daerah tambang kenangan asal Papua. "Ini sebuah langkah maju di Tanah Papua, khususnya untuk bidang kesenian," kata Wem Mesido saat menerima sertifikat di Room Cafe Sarih Kuring Nabire, Selasa (6/2).

Dikatakan, hal tersebut merupakan suatu mimpi yang baru terwujud bagi para musisi di Bumi Cenderawasih di bawah kepemimpinan Putra Papua, Anthonius M. Ayorbaba.

Eksplor Potensi IG Itik Alabio: Langkah Strategis untuk Pelindungan dan Kemajuan Sektor Peternakan



Kalimantan Selatan

9 Maret 2024

Amuntai - Melanjutkan perjalanan eksplorasi terhadap potensi indikasi geografis (IG), Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Selatan bersama Dinas Perkebunan dan Pertanian Provinsi Kalsel dan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) kembali melaksanakan peninjauan lanjutan.

Kali ini, kunjungan ditujukan pada potensi IG lainnya, yaitu Itik Alabio (*Anas platyrhynchos* Borneo). Kelompok Peternak Itik Alabio menjelaskan terkait proses pembudidayaan Itik Alabio, mulai dari pemberian pakan hingga produksi daging dan telur.

DJKI Mengajar dan RuKI Kanwil Kumham Kepri Kenalkan KI di 10 Sekolah Kabupaten Karimun



Kepulauan Riau

17 Februari 2024

Tanjung Balai Karimun - Kantor Wilayah Kemenkumham Kepulauan Riau menyelenggarakan kegiatan DJKI Mengajar dengan mengusung slogan 'Kenali Kekayaan Intelektual Sejak Usia Dini'. Pada kesempatan tersebut, Guru Kekayaan Intelektual (RuKI) Kanwil Kumham Kepri mengenalkan KI kepada 1000 siswa di sepuluh Sekolah SD dan SMP di Kabupaten Karimun yang berlangsung selama dua hari, 15-16 Februari 2024.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Karimun, Sugianto menyambut baik dan memberikan apresiasi atas kegiatan DJKI Mengajar yang dilaksanakan di Karimun.

**JANUARI
2024**

Komitmen DJKI Tingkatkan Kinerja Pelindungan Kekayaan Intelektual pada 2024

Jakarta - Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI), Min Usihsen menyatakan pihaknya mengapresiasi semangat dan dedikasi seluruh pejabat dan pelaksana dalam ekosistem pelindungan kekayaan intelektual (KI) Indonesia. Berkat kerja keras tersebut, ada peningkatan permohonan. Pada akhir 2023, total ada peningkatan permohonan KI hingga 303.781 atau naik 17,12% dari 2022.



Petakan Jalan Menuju Kantor KI Berkelas Dunia, DJKI Tinjau Pelaksanaan Rencana Strategis 2020-2024

Bandung - Visi DJKI untuk menjadi World Class Intellectual Property Office merupakan arah kebijakan DJKI dalam Rencana Strategis (Renstra) DJKI 2020-2024 yang berfokus pada peningkatan optimalisasi layanan publik berbasis teknologi informasi.



Bersama Korea dan Interpol, DJKI Tindak Pelaku Pelanggaran KI di Indonesia

Jakarta - DJKI sebagai salah satu penegak hukum atas pelanggaran KI di Indonesia, ikut serta dalam menangani perkara dugaan tindak pidana di bidang hak cipta yang dilakukan warga negara Korea di Indonesia, yaitu penyebarluasan ciptaan dan penggandaan ciptaan secara komersial Lembaga penyiaran dalam bentuk IPTV (Internet Protocol Television) yang telah dilaporkan secara resmi ke DJKI pada Mei 2023, diketahui menjalankan penyiaran secara ilegal pada kurun waktu sembilan tahun tanpa izin dari pemegang hak dan meraup keuntungan hingga kurang lebih 1,7 miliar won.



Kunjungan Industri Awali Rangkaian Kegiatan Patent One Stop Service di Jawa Barat

Bandung - DJKI Kemenkumham terus berupaya meningkatkan jumlah permohonan dan penyelesaian paten dalam negeri, salah satunya melalui kegiatan Pelayanan Paten Terpadu atau Patent One Stop Service yang akan diselenggarakan di 33 provinsi di seluruh Indonesia.



DJKI Berhasil Selesaikan Mediasi Hak Cipta Motif Batik Kain Tua Biku dan KAGANO

Bengkulu - DJKI Kemenkumham berhasil menyelesaikan mediasi hak cipta motif Batik Kain Tua Biku dan Motif Batik Kagano yang diselenggarakan di Ruang Rapat Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Kantor Wilayah Kemenkumham Bengkulu, pada 15-16 Januari 2024.



FEBRUARI 2024

DJKI Bahas Rencana Strategis 2024-2029 Menuju Kantor KI Berkelas Dunia

Jakarta - Dirjen KI, Min Usihen memimpin rencana strategis (renstra) lima tahun mendatang untuk memastikan langkah DJKI menuju kantor KI berkelas dunia berjalan lancar. Melalui kegiatan ini DJKI berharap akan ada rencana tindak lanjut serta eksekusi yang efektif guna menyelesaikan dan menuntaskan pelaksanaan Renstra DJKI 2020-2024; serta menyusun kebijakan dan program yang sesuai, tepat sasaran, dan beriringan dengan kondisi aktual KI.



Sejumlah Pemeriksa Paten Ikuti Pelatihan Pemeriksaan Paten

Jakarta - DJKI bekerja sama dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) dan Japan Patent Office (JPO) menggelar Kegiatan On The Job Training (OJT) on Patent Examination pada 19-22 Februari 2024 di Jakarta. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pemeriksa paten DJKI dalam melakukan pemeriksaan substantif

Tingkatkan Ekosistem KI, DJKI Ikuti Forum Penggunaan Teknologi Informasi di Thailand

Bangkok - Indonesia melalui DJKI Kemenkumham mengirimkan perwakilannya dalam WIPO-ASEAN IT Strategic Forum: Harnessing the Potential of the ASEAN IP Register for a Stronger Regional IP Ecosystem yang diselenggarakan pada 31 Januari-1 Februari 2024 di Bangkok, Thailand. Pertemuan ini dihadiri oleh koordinator nasional pendaftaran kekayaan intelektual dari setiap negara anggota Association of South-east Asian Nations (ASEAN), perwakilan Japan Patent Office (JPO), dan World Intellectual Property Organization (WIPO).



Sekretaris DJKI Paparkan Kesiapan DJKI Bangun Indonesia IP Academy

Jenewa - Sekretaris DJKI Kemenkumham, Sucipto memimpin pertemuan dengan Deputy Director General for Regional and National Development Sectors World Intellectual Property Organization (WIPO) Hasan Kleib untuk membahas tindak lanjut pendirian Indonesia IP Academy di Jenewa, Swiss pada Jumat, 2 Februari 2024.

Optimalisasi Pengelolaan PNBP, DJKI Gelar Rapat Koordinasi

Tangerang -DJKI Kemenkumham terus berupaya memperbaiki tata kelola Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang ada di DJKI sehingga pelaksanaannya sesuai dengan amanat UU No. 9 tahun 2018 tentang PNBP.



**MARET
2024**

Sekretaris DJKI Tanamkan Nilai PASTI Kepada 410 PPPK Baru

Jakarta - Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Sucipto memberikan pengarahan kepada 410 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (PPPK) baru di lingkungan DJKI pada Rabu, 6 Maret 2024, di Aula Demar Seno Adji, Gedung Eks Sentra Mulia, Jakarta. Pada pengarahannya, Sucipto menyebutkan bahwa para PPPK harus bersiap untuk menjalankan tugas sebaik mungkin.



KANWIL KEMENKUMHAM SUMATERA UTARA



Lima Produk Lokal Diputuskan Menjadi Indikasi Geografis Terdaftar

Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) melakukan pembahasan hasil pemeriksaan substantif Indikasi Geografis (IG) yang memutuskan bahwa kelima permohonan tersebut dapat diterima menjadi IG terdaftar pada Selasa, 19 Maret 2024, di Kantor DJKI, Jakarta.

Tingkatkan Daya Saing di Bidang KI, Patent One Stop Service Hadir di Sumatera Utara

Medan - DJKI Kemenkumham bekerja sama dengan Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Utara menyelenggarakan kegiatan Patent One Stop Service (POSS) di Aula Soepomo Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Utara, Selasa, 5-7 Maret 2024. Kegiatan ini merupakan salah satu program unggulan DJKI pada 2024, khususnya Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST), dan Rahasia Dagang (RD), yang diselenggarakan di 33 provinsi/kantor wilayah untuk perguruan tinggi, penelitian dan pengembangan (litbang), dan pelaku usaha.



Tingkatkan Pelayanan Prima, DJKI Gelar FGD Bahas Permasalahan Aplikasi Desain Industri

Jakarta - Permasalahan teknis dalam perlindungan kekayaan intelektual (KI), salah satunya Desain Industri masih sering dialami oleh para pengguna layanan aplikasi, yakni pemohon, konsultan KI, maupun petugas pemeriksa desain industri.

Delegasi Indonesia Hadiri Pertemuan ANIEE ke-13 di Singapura

Singapura - Delegasi Republik Indonesia yang dipimpin oleh Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa Anom Wibowo menghadiri pertemuan Asian Network of Intellectual Property Enforcement Expert (ANIEE) di Singapura pada Jumat, 22 Maret 2024.





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Indikasi Geografis 2024



Potret Peminum Kopi, dari *Newbie* sampai Si Paling Ngopi



Tak sekadar mengisi waktu luang, secangkir kopi punya ruang tersendiri di hati peminumnya. Tumbuh di wilayah dan diproses dengan cara yang berbeda-beda; setiap jenis kopi punya karakter khusus yang kerap lekat dengan kepribadian peminumnya. Pun, nuansa kedai kopi yang dipilih, bahkan dapat menjadi tolok ukur kita mengenali seseorang.

Sering kali, sejumlah orang merasa tidak dapat memulai paginya dengan tepat tanpa secangkir kopi. Lantas, mengapa ada begitu banyak orang yang merasa terhubung dengan kopi? Kali ini, kita akan mengurai karakter dari para peminum kopi: mulai dari kebiasaan nongkrong hingga jadi ritual penting memulai hari.

Kopi sebagai Seni

Pernahkah Anda mendengar *latte art*? Bagi tipe ini, selain rasa, tampilan kopi juga punya peran penting. Anda akan menemukan tipe ini di kedai-kedai kopi unik. Adapun tak sekadar menikmati tampilan dan rasanya, tipe ini juga tak segan untuk mempelajari *latte art*.



Newbie dan Kebutuhan Sosial

Umumnya, ketertarikan tipe ini berawal dari fungsi kopi sebagai kebutuhan sosial. Menjamurnya kedai kopi bukan hanya mengakomodasi kebutuhan pecinta kopi, tetapi juga mereka yang butuh destinasi berkumpul bahkan bekerja. Hal ini ditambah, mayoritas kedai kopi saat ini juga dirancang sangat nyaman, sehingga wajar saja jika orang betah berlama-lama.

Harus Minum Kopi

Tipe ini punya level kebutuhan yang tinggi untuk *ngopi* setiap harinya. Alasannya, sering kali karena asupan kafein amat dibutuhkan untuk dapat bersemangat dan bebas dari rasa kantuk, ketika bekerja atau beraktivitas. Mengingat kopi yang sudah seperti candu, mereka bahkan tidak lagi khawatir untuk minum kopi ketika malam.

Pecinta Kopi

Tak seperti tipe dua, biasanya pecinta kopi tak perlu setiap hari *ngopi*. Namun, tipe ini biasanya amat selektif saat minum kopi. Mereka amat peduli dan paham dengan asal-usul kopi yang akan dikonsumsi, mulai dari jenis biji, sejarah, teknik roasting, takaran, penyeduhan, tingkat keasaman, dan segala macamnya! Nah, karena paham, mereka punya cara khusus untuk menikmati kopi.

Temukan 10 produk indikasi geografis (IG) di bawah ini!

A	V	C	R	Y	S	O	N	G	K	E	T	P	A	L	E	M	B	A	N	G	C	A
K	E	A	H	L	K	C	K	I	P	K	U	G	N	Q	W	N	J	K	U	R	Y	K
O	T	H	R	J	K	C	T	K	S	H	U	O	J	P	A	T	U	O	K	Y	E	
P	E	K	I	U	X	G	K	Z	K	A	J	T	L	A	R	T	I	O	K	E	H	R
I	H	D	J	W	A	I	Y	K	F	G	K	R	T	U	K	R	E	I	K	L	J	I
M	T	G	J	K	Q	L	Z	R	I	U	L	E	E	A	K	A	K	V	N	A	D	S
A	A	I	U	O	G	S	E	B	K	R	G	U	O	P	H	S	A	T	I	P	K	S
N	M	R	K	K	Y	E	W	K	D	J	F	K	W	A	I	K	D	Y	O	A	W	O
G	B	T	E	C	O	S	Y	K	Z	A	K	T	S	D	G	K	F	G	M	P	G	L
G	I	J	W	H	U	K	F	K	X	K	D	T	A	O	V	N	K	U	K	A	J	O
A	D	K	D	F	H	K	R	I	O	L	K	S	V	L	D	I	E	T	W	N	A	H
R	S	A	S	Y	R	H	J	I	O	P	K	W	D	A	O	Y	L	O	W	D	S	K
A	D	K	U	L	I	T	K	E	R	B	A	U	S	U	M	B	A	K	K	A	W	L
I	D	J	K	O	W	Q	A	Z	K	U	E	S	D	K	R	O	W	R	Q	N	A	E
Z	F	K	P	K	A	S	K	L	J	K	Y	Y	Z	K	E	P	K	I	O	W	R	D
F	U	L	K	W	T	Q	I	O	T	Z	P	E	Y	K	E	C	W	U	R	A	U	G
K	A	I	N	T	A	P	I	S	L	A	M	P	U	N	G	K	K	K	N	I	H	
D	U	O	Q	Z	U	I	O	E	K	U	P	W	X	V	B	N	K	M	O	G	O	Y
E	O	Q	R	T	C	T	Y	I	O	P	V	Z	S	E	E	R	W	T	I	O	K	I
U	Y	I	R	E	I	Q	H	Z	X	B	N	I	K	L	P	T	W	A	S	U	I	O
S	D	T	I	W	C	S	K	L	A	W	Q	O	E	P	I	F	D	W	P	S	A	W
A	S	A	S	A	K	S	A	D	E	R	A	T	T	A	N	C	R	A	F	T	W	O
G	Z	L	T	E	N	U	N	I	K	A	T	T	R	O	S	O	L	P	R	S	Q	W

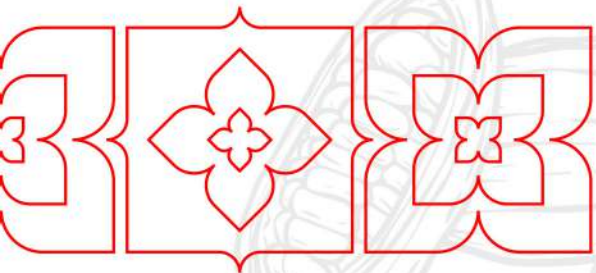


KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Ingin tahu lebih banyak tentang Kekayaan Intelektual?

Unduh Modul KI, Komik KI, dan Majalah HKI
Kunjungi dgip.go.id lalu klik

unduh



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga
melayani
bangsa

DGIP.GO.ID

Dengan Persetujuan Otomatis, Layanan DJKI Semakin Cepat dan Praktis

Kini 4 layanan kekayaan intelektual di DJKI sudah menerapkan **POP (Persetujuan Otomatis Permohonan)**, yaitu :

1. Pencatatan Hak Cipta (POP HC)
2. Perpanjangan Merek
3. Pencatatan Lisensi Merek
4. Petikan Resmi Merek



Perpanjangan Merek
Anda **Disetujui**